# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan Pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun dalam perjalanan sebuah dokumen perencanaan bisa mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Seperti hal nya di tahun 2020 ini terjadi perubahan nomenklatur yaitu diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan target di beberapa sektor.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan dan mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan teknis, penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Di dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan sumber daya dan sumber dana serta penggunaan fasilitas aset pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana strategis.

Sebagaimana tercantum dalam Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap V tahun 2018-2023 yang menjadi acuan Organisasi Perangkat Darah didalam menyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lima tahun kedepan.

Rencana strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan dinas periode lima tahun kedepan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi, Misi Kota Bekasi serta agenda pembangunan kepala daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain mengacu kepada RPJPD, RPJMD, Visi Misi Kota Bekasi sesuai dengan Misi ke 1 (satu) dan Misi ke 3 (tiga).

Misi ke 1 (satu): Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan ke 1 (satu): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntable, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.

Misi ke 3 (tiga): Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Tujuan ke 3 (tiga): Memperkuat struktur perekonomian kota dengan focus pengembangan ekonomi kreatif, Sasaran 3.3 Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif dan Strategi adalah Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata.

Agar perencanaan Dinas selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi tahun 2013-2028, maka penyusunan rencana strategis memperhatikan kebijakan dalam RIPPDA melalui : Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah, Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi objek-objek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan dan Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian objek wisata baru.

Kota Bekasi masuk dalam 6 wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata (WP Bodebekpunjur) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Nomor 660.1/1406/DLH tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Pemerintah Kota Bekasi mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi yang ada dalam rangka pelayanan kepada masyarakat urusan pariwisata dan kebudayaan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan juga diperlukan dukungan partisipatif dari stakeholder dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata dan kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada tataran penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana strategis Perubahan adalah sebagai berikut : Pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis Perubahan yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengumpulan data bidang teknis dan evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, Rapat koordinasi internal untuk penyusunan Draf Renstra Perubahan Dinas , Rapat koordinasi Dinas dengan Dinas terkait dan stakeholder Dinas antara lain : PHRI, ASITA, Sanggar seni tradisional/kontemporer dan kemudian Draf Renstra di sampaikan ke Bappelitbangda untuk di asistensi oleh Konsultan perencana yang ditunjuk Bappelitbangda secara bertahap sejalan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 sampai dengan draf dinyatakan final.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

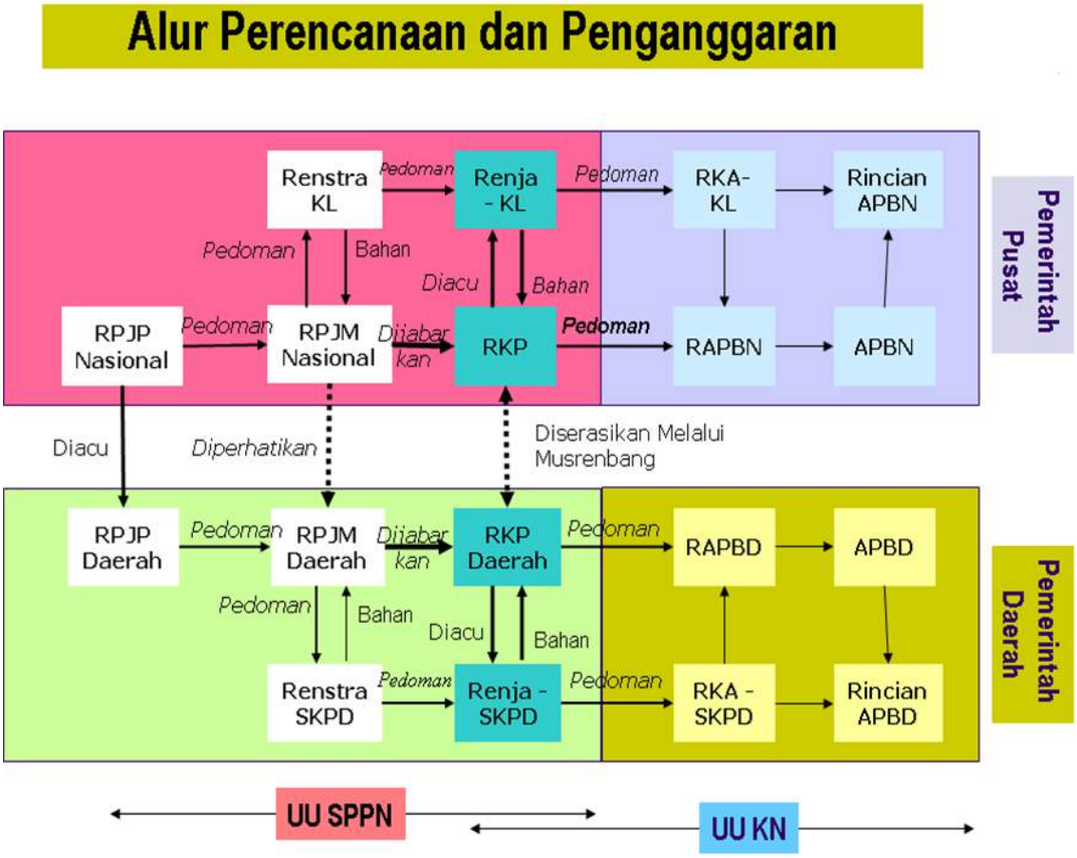


Gamar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sebagai dokumen perencanaan daerah, dokumen renstra Perubahan ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam proses penyusunannya dokumen renstra Perubahan ini berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023. Namun demikian, proses renstra perubahan ini juga menjadi bahan dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya, untuk perencanaan jangka pendek Dokumen Renstra juga menjadi bahan untuk dipedomani saat menyusun Renja SKPD setiap tahunnya. Dalam proses penyusunannya dokumen renstra juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya selain RPJMD Kota Bekasi, antara lain Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Renstra kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan juga diperlukan dukungan partisipatif dari stakeholder dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata dan kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada tataran penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi antara lain : Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi perangkat daerah, Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan dan Isu strategis yang berkembang dan perkiraan di masa mendatang.

## 1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

d. Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Thun 2009 Tentang Kepariwisataan;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

h. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

l. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Bekasi;

m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;

n. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2028;

o. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023;

p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

q. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;

r. Keputusan Wali Kota Bekasi No : 430/Kep-321-Disparbud/VII/2018 tentang Penetapan Tempat dan Bangunan Bersejarah di Kota Bekasi;

s. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Nomor 660.1/1406/DLH tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat : tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rincian kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam lima tahun anggaran, serta wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi .

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan rencana strategis Perubahan ini adalah untuk membangun sebuah rencana strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan adanya rencana strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah: Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif; merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi, merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai, rencana strategis Perubahan juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah, penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan perangkat daerah, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi disusun dengan sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perubahan OPD, fungsi Renstra Perubahan OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kab./kota, dan dengan Renja OPD

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Sumber daya PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran PD melalui pelaksanaan Renstra Perubahan PD,

Capaian kinerja antara Renstra Perubahan PD dengan RPJMD periode sebelumnya serta hambatan dan permasalahan PD yang perlu di antisipasi.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran strategi yang ingin dicapai oleh OPD

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjabarkan Strategi dan Kebijakan masing-masing bidang/bagian dalam periode lima tahunan dan tahunan

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjabarkan program dan kegiatan indikatif masing-masing bidang/bagian dalam periode tahunan dan lima tahunan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN OPD

## 2.1 Peranan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pariwisata dan kebudayaan.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 1 Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :

Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :
   a. Sub Bagian Perencanaan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
   a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
   b. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional
   c. Seksi Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah
3. Bidang Pengembangan Kesenian, membawahkan :
   a. Seksi Seni Tradisi
   b. Seksi Seni Kontemporer
   c. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesenian
4. Bidang Pemasaran, membawahkan :
   a. Seksi Promosi
   b. Seksi Analisis Data dan Informasi
   c. Seksi Sarana Promosi
5. Bidang Kepariwisataan, membawahkan :
   a. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Perizinan
   b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinsikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

**Sekretariat mempunyai tugas :**

1. Koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**Bidang Pemasaran mempunyai tugas :**

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran pariwisata dan Kebudayaan daerah;
2. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran pariwisata dan Kebudayaan;
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pemasaran pariwisata daerah;
4. Penyelenggaraan koordinasi dengan kabuaten/kota dalam melaksanakan event promosi pariwisata dan kebudayaan daerah;

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas :**

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Penyelenggaraan Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Perizinan, Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata serta Pemberdayaan masyarakat pariwisata, yaitu :
   a. Fasilitasi pelaksanaan dalam upaya pengembangan pemasaran kepariwisataan;
   b. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sert penerapan standarisasi pada usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Obyek Wisata, atraksi wisata dan Jasa Usaha Kepariwisataan;
   c. Penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata, produk wisata, obyek wisata dan daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

**Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :**

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya kebudayaan dan cagar budaya, Sejarah dan Nilai radisional Pengelola Sarana dan Prasarana Kebudayaan, yaitu :
   a. Fasilitasi penetapan kebijakan sistem pengembangan sumber daya kebudayaan;
   b. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan kegiatan seni dan budaya daerah dan luar daerah; dan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

c. Fasilitasi penetapan kebijakan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa dalam pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.

4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

**Bidang Pengembangan Kesenian mempunyai tugas :**

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang ;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya
3. Penyelenggaraan pengembangan seni tradisi, seni kontemporer dan sarana dan prasarana ;
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait ;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya ;
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas ;

Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2008.

Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional /Provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

5. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
6. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
8. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.
9. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.
10. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.
11. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.
12. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.
13. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
14. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.
15. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
16. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
17. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan / kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.
18. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

19. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
20. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
21. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.
22. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.
23. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
24. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.
25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
26. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional *"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"* skala kota.
27. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.
28. Penetapan BCB/situs skala kota.
29. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.
30. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
31. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.
32. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.
33. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi:
34. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
35. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
36. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

37. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
38. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
39. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:
40. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
41. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
42. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
43. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.
44. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.
45. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.
46. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
47. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
48. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
49. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
50. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
51. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di / kota.
52. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.
53. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.
54. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
55. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
56. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.
57. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.
58. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.
59. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
60. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

61. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.
62. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
63. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
64. Pemetaan sejarah skala kota.
65. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
66. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.
67. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.
68. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.
69. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.
70. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.
71. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
72. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
73. Registrasi museum dan koleksi di kota.
74. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
75. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
76. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
77. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.
78. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.
79. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
80. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota
81. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

82. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
83. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
84. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
85. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.
86. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.
87. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kota.
88. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.
89. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
90. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota.
91. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
92. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
93. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
94. Penyelenggaraan promosi skala kota:
95. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
96. Peserta/penyelenggara pameran/ *event, roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
97. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.
98. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.
99. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.
100. Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

101. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.
102. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kota.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 2.1**
**Bagan Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

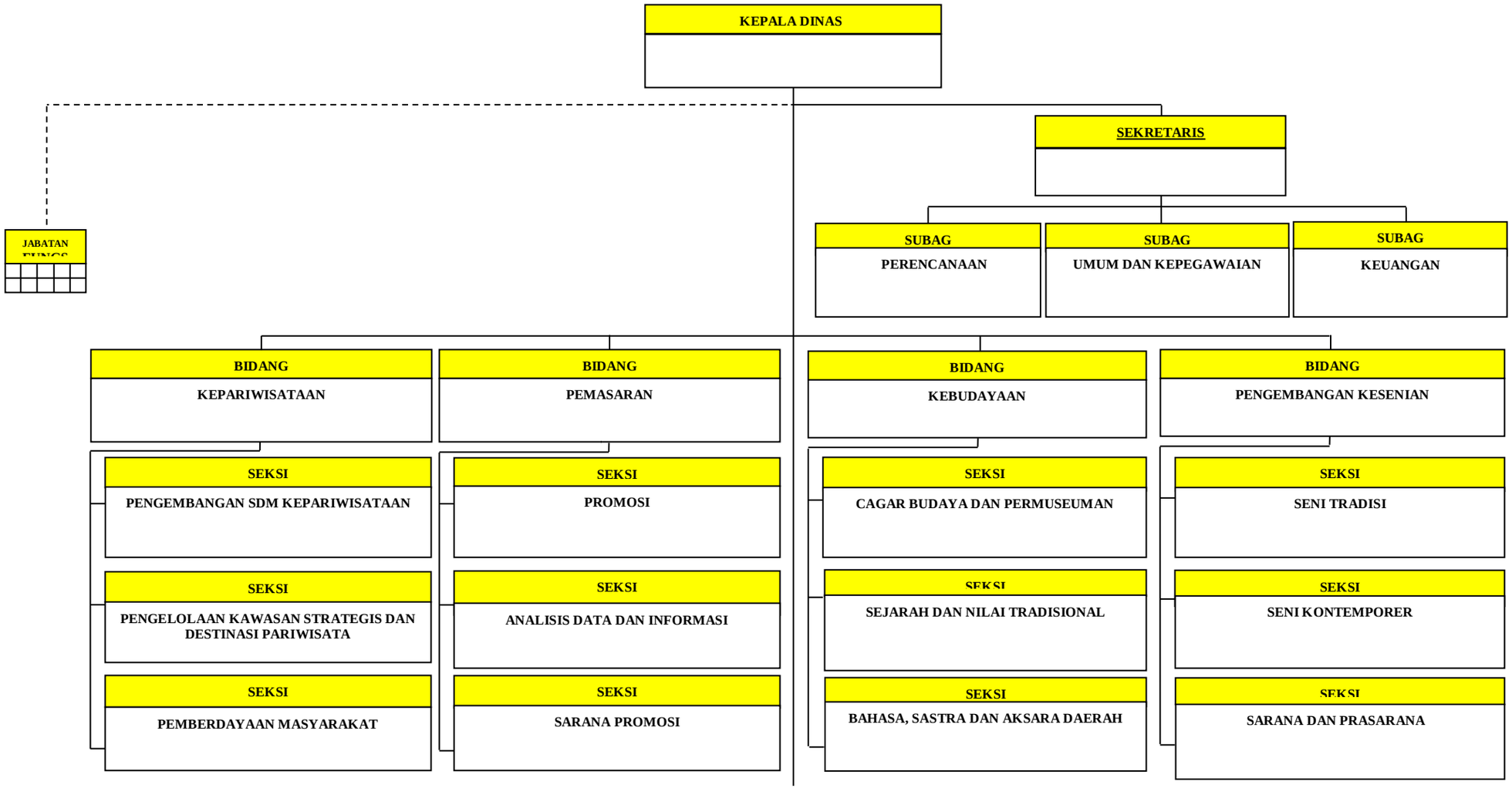


| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## 2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berlokasi di kantor Pemerintah Kota Bekasi Jl. Ahmad Yani No.01 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada urusan kepariwisataan dan kebudayaan dengan memiliki kekuatan SDM yang terdiri dari pegawai struktural yang dimulai dari Eselon II/b jabatan Kepala Dinas, Eselon III/a jabatan Sekretaris, 4 Eselon III/b jabatan Kepala Bidang, 3 Eselon IV/a jabatan Kepala Sub. Bagian, dan 12 Eselon IV/a jabatan Kepala Seksi.

Jumlah pegawai keseluruhan adalah 68 orang dengan rincian sebagai berikut : 21 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV, 15 orang pegawai pelaksana PNS golongan II dan III, dan 32 orang pegawai tenaga kontrak kerja (TKK) dengan pendidikan SMA dan Sarjana. Komposisi pegawai berdasarkan dolongan, pendidikan dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

**Data pegawai berdasarkan Golongan**

| NO | Bagian/Bidang | Golongan | | | | TKK | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1 | Sekretariat | - | 3 | 4 | 3 | 14 | 24 |
| 2 | Pariwisata | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | Pemasaran | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | Kebudayaan | - | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | Pengembangan Kesenian | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Jumlah | | 0 | 11 | 14 | 11 | 32 | 68 |

Berdasarkan data pegawai berdasarkan golongan dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pegawai pelaksana PNS golongan II dan golongan III untuk menjadi pelaksana administrasi (PA) kegiatan pada bidang bidang yang mempunyai banyak kegiatan. Hal ini mengakibatkan 1 (satu) orang tenaga pelaksana PNS memegang beberapa kegiatan.

Selain kurangnya tenaga pelaksana administrasi pada kegiatan untuk jabatan fungsional tertentu juga belum terisi.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 2.3**

**Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO | Bagian/Bidang | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | |
| 1 | Sekretariat | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 24 |
| 2 | Pariwisata | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| 3 | Pemasaran | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | Pengembangan Kesenian | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 18 | 6 | 33 | 11 | 68 |

Berdasarkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikan kondisi saat ini masih kurangnya pegawai PNS dengan tingkat pendidikan Diploma dan tingkat SMP/SD kondisi yang ada seperti piramida terbalik ( pegawai banyak yang pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana Dalam suatu organisasi pemerintahan pegawai dengan latar pendidikan setingkat SMP/SD tetap diperlukan demi kelancaran pekerjaan.

**Tabel 2.4**

**Data Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur**

| NO | Berdasarkan Umur | PNS Golongan | | | | TKK | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 23 – 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 29 – 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 3 | 35 – 40 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | 41 – 46 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | 47 – 52 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 53 – 58 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 7 | 59- ke atas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | | | 11 | 14 | 11 | 32 | 68 |

Berdasarkan data pegawai menurut kelompok umur komposisi nya seimbang dan cenderung tinggi pada kelompok umur (47-52) dengan jumlah 8 orang dan pada kelompok umur (53-58) sejumlah 14 orang, yang berarti banyak pegawai yang menjelang pensiun.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Selanjutnya, perlu adanya penambahan tenaga PNS untuk kaderisasi terutama pada jabatan jabatan struktural maupun fungsional.

Dilihat dari keseluruhan komposisi dan keadaan pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi jabatan jabatan khusus yang diharuskan untuk diisi oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II dan golongan III seperti pengelola administrasi, jabatan fungsional kearsipan, dan untuk staf di tiap jabatan eselon IV yaitu kepala seksi dan kepala sub bagian;
2. Masih kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlatar belakang pendidikan bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Masih kurangnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV;
4. Masih kurangnya kompetensi tenaga kontrak kerja (TKK).

**Tabel 2.5**

**Data Pegawai Berdasarkan Gender**

| NO | Berdasarkan Golongan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Golongan I | - | - |
| 2 | Golongan II | 9 | 2 |
| 3 | Golongan III | 7 | 8 |
| 4 | Golongan IV | 6 | 5 |
| Jumlah | | 22 | 15 |

Berdasarkan data pegawai menurut Gender komposisi nya tidak seimbang dan cenderung tinggi pada Gender laki-laki dengan jumlah 22 orang dan pada Gender Perempuan sejumlah 15 orang, yang berarti banyak pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, perlu adanya penambahan tenaga PNS untuk kaderisasi terutama pada jabatan jabatan struktural maupun fungsional.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## 2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan menghadapi beberapa kendala antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik yang nendukung untuk urusan kepariwisataan dan kebudayaan;
2. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia terutama yang berlatar pendidikan bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Masih kurangnya regulasi yang mendorong perkembangan pariwisata dan pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi;
4. Minimnya alokasi anggaran dari APBD Pemerintah Kota Bekasi ;

Dengan adanya kendala yang dihadapi tidak menggugurkan kewajiban perangkat daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kondisi yang ada harus diatasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Beberapa kebutuhan yang saat ini dirasakan sangat mendesak untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain :

1. Panggung portabel yang dapat digunakan dimanapun yaitu berupa panggung mobil yang dapat digunakan dimanapun seperti : digunakan untuk pentas seni di area car free day, untuk tampilan pentas seni dalam rangka menghadiri undangan kabupaten/kota di Jawa Barat yang biasanya dilaksanakan dalam undangan kabupatan/kota yang memperingati ulang tahun kabupaten/kota.
2. Sound system dengan watt besar untuk tampilan pentas seni atau festival seni budaya yang diselenggarakan baik di panggung indoor maupun outdoor.
3. Sarana promosi berupa bilboard yang dipasang di tempat tempat strategis seperti pusat kota, pintu masuk bandara, pintu masuk jalan tol, dan lain lain.
4. Diperlukan kendaraan operasional dinas untuk monitoring pelaku jasa usaha pariwisata dan hiburan umum.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 2.6**
**Data Inventaris Kantor**

| NO | Nama | Banyaknya | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyektor | 3 | 2017 | Baik |
| 2 | Kursi Pejabat Eselon IV | 15 | 2017 | Cukup Baik |
| 3 | Kursi Pejabat Eselon II | 2 | 2017 | Baik |
| 4 | Kursi Pejabat Eselon III | 7 | 2017 | Cukup Baik |
| 5 | Printer Hp Laserjet | 6 | 2017 | Baik |
| 6 | Note Book | 6 | 2017 | Cukup Baik |
| 7 | Komputer | 13 | 2017 | Cukup Baik |
| 8 | Sofa | 3 | 2017 | Baik |
| 9 | Kursi Biasa | 22 | 2017 | Baik |
| 10 | Mesin Absensi | 1 | 2017 | Baik |
| 11 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 2017 | Baik |
| 12 | Lemari Kaca | 1 | 2017 | Baik |
| 13 | Filing Cabinet | 28 | 2017 | Cukup Baik |
| 14 | Lemari Besi | 8 | 2017 | Baik |
| 15 | Rak Penyimpanan | 3 | 2017 | Baik |
| 16 | Handphone | 3 | 2016 | Baik |
| 17 | Kursi Kerja Non Struktural | 9 | 2016 | Cukup Baik |
| 18 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 3 | 2016 | Cukup Baik |
| 19 | Meja Pegawai | 42 | 2016 | Cukup Baik |
| 20 | Sever | 2 | 2016 | Baik |
| 21 | Printer | 3 | 2016 | Cukup Baik |
| 22 | Laptop | 4 | 2016 | Cukup Baik |
| 23 | Scanner | 1 | 2015 | Baik |
| 24 | Rak Besi Metal | 6 | 2015 | Cukup Baik |
| 25 | Lemari Besi | 2 | 2015 | Baik |
| 26 | Mesin tik elektronik | 1 | 2015 | Baik |
| 27 | Kunci Khusus Engine | 1 | 2015 | Rusak Berat |
| 28 | Sound System | 1 | 2014 | Kurang Baik |
| 29 | Meja Pegawai Non Struktural | 2 | 2014 | Rusak Berat |
| 30 | Rak arsip | 2 | 2014 | Rusak Berat |
| 31 | Senar Drum | 3 | 2007 | 2 Rusak ringan, 1 Rusak Berat |
| 32 | Kwarton Standar | 1 | 2009 | Rusak Berat |
| 33 | Bariton | 1 | 2009 | 1 Rusak berat |
| 34 | Bendera Coulor | 1 | 2009 | Rusak Berat |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Guard | | | |
| 35 | Stik Mayorette 150 cm | 1 | 2009 | Rusak Berat |
| 36 | Pakaian Seragam Marching drum | 1 | 2009 | Rusak Berat |
| 37 | Frenc Horn | 2 | 2009 | Rusak ringan |
| 38 | Fluegel Horn | 3 | 2009 | 2 rusak ringan, 1 Rusak Berat |
| 39 | Melophone | 1 | 2009 | Rusak Ringan |
| 40 | Trumpet | 6 | 2009 | 5 Rusak ringan, 1 Rusak Berat |
| 41 | Quintom | 2 | 2009 | Rusak Berat |
| 42 | Marching Bells | 3 | 2009 | Rusak Berat |
| 43 | Tuba | 1 | 2009 | Rusak Berat |
| 44 | Gitar Bass LA musik | 1 | 2009 | Rusak Berat |

Berdasarkan data inventaris kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas dan terselenggarannya pelayanan yang baik kepada masyarakat masih terdapat kekurangan beberapa peralatan seperti : laptop, komputer, printer, hard disk external, almari penyimpanan berkas dan mesin foto copy.

Alat alat musik drumdband yang di punyai Dinas dalam rangka kegiatan pembentukan dan pembinaan marching band Gita Patriot Kota Bekasi, karena 2 tahun terakhir ini tidak digunakan disebabkan tidak dialokasikan anggaran pada kegiatan oleh Bappelitbangda, mengakibatkan banyak peralatan yang rusak dan harus direhabilitasi atau di adakan kembali.

**Tabel 2.7**
**Data Aset Bangunan**

| No | Nama Bangunan | Tahun Pengadaan | Lokasi | Status Tanah | Penggunaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Kesenian | tahun 2014 | Situ Rawa Gede, Kel Bojong Menteng Kec.Rawalumbu | Milik negara | Sarana penyelenggaraan festival Seni dan Budaya | Gedung baru di serah terimakan dari DISPORBUDPAR ke DISPARBUD |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kawasan Wisata Kuliner | tahun 2015 | Jl. Terusan Asrama Haji | Milik negara | Kawasan wisata kuliner | Terdapat 30 kios tenda untuk pedagang kuliner |
| 3 | Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan | tahun 2017 | Perumahan Duta Harapan | Milik negara | Kawasan wisata kuliner | Terdapat 20 kios untuk pedagang kuliner |
| 4 | Gedung BCCP | Tahun 2021 | Lapangan Multiguna Margahayu Bekasi Timur | Milik negara | Bekasi Creativ Center Pemuda | Gedung yang diserah terimakan dari DISPORA ke DISPARBUD |

Pembangunan Gedung Kesenian H. Djaini yang berupa gedung kesenian yang telah dilaksanakan pembangunannya oleh Dinas perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2017 merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 yaitu : Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif dengan target 1 gedung indoor. Dan pada tahun 2018 telah di serahterima kan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pengguna. Dengan adanya serah terima maka gedung kesenian menjadi aset tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang berarti pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selanjutnya gedung kesenian untuk dapat digunakan diperlukan sarana dan prasarana seperti : panggung pentas, alat alat kesenian, sound system, peralatan kantor meja, kursi, komputer, dan lain lain. Untuk pemeliharaan nya dibutuhkan alokasi anggaran untuk petugas kebersihan yang di gaji tiap bulan oleh pemerintah daerah. Dilihat dari luasnya bangunan gedung kesenian diperlukan minimal 2 (dua) orang petugas kebersihan agar kebersihan gedung tetap terjaga dengan baik.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Kawasan Wisata Kuliner berlokasi di Jl. Terusan Asrama Haji didepan Apartemen Center Point Blok D, merupakan kawasan kuliner yang menggunakan tenda bongkar pasang dengan jumlah 30 (tiga puluh) buah. Konsep awal dibuatnya kawasan wisata kuliner adalah untuk menambah destinasi wisata di Kota Bekasi yang menyajikan makanan khas daerah walaupun pada akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata kuliner yang menyajikan makanan khas daerah dan kuliner moderen.

Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan ditetapkan sebagai kawasan wisata kuliner di Perumahan Duta Harapan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi bertujuan sebagai inisiatif untuk mengembangkan wisata danau Duta Harapan dengan pembangunan kawasan wisata kuliner. Konsep awal pembangunan Kawasan Wisata Kulinet Danau Duta Harapan dibangun kawasan kuliner sejumlah 20 kios, 5 gazebo dan dilengkapi dengan mushola dan toilet. Pengadaan bangunan pada tahun anggaran 2017 dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp. 560.000.000 dapat dibangun kios kuliner sejumlah 20 (dua puluh) unit dan saat ini sudah digunakan oleh pedagang yang berasal dari lingkungan Perumahan Duta Harapan.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan kepariwisataan melalui ekonomi kreatif. Dipahami Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Kreatifitas dan inovasi menjadi asset yang lebih berharga apabila dibandingkan dengan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan dukungaan Pemerintah Kota Bekasi mengenai kebijakan yang berhubungan dengan industri kreatif. Oleh karena itu maka dibangun Gedung Bekasi Creatif Centre Pemuda sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan ide-ide kreatif yng dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui gedung ini diharapkan menjadi tempat berkumpul dan berkolaborasi para pelaku ekonomi kreatif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dapat menumbuhkan branding kota bekasi sebagai kota kreatif yang pada gilirannya meningkatnya kunjungan wisatawan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 2.8**
**Data Aset Kendaraan Dinas**

| NO | MERK/TYPE | NO.POL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | B 9010 KSL | Kondisi Baik |
| 2 | Toyota Kijang Innova | B 1313 KQN | Kondisi Baik |
| 3 | Daihatsu Terios | B 1015 KQN | Kondisi Baik |
| 4 | Daihatsu Xenia | B 1153 KQN | Kondisi Baik |
| 5 | Daihatsu Xenia | B 1155 KQN | Kondisi Baik |
| 6 | Daihatsu Terios | B 1009 KQN | Kondisi Baik |
| 7 | Suzuki Minibus | B 2874 YQ | Kondisi Baik |

**Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Perijinan**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki SOP yang berlaku pada tahun 2013-2018 yaitu :

**Urusan Kebudayaan :**

1. SOP Pemakaian Gedung Kesenian
2. SOP Penyelenggaraan festival seni budaya daerah
3. SOP Penyelenggaraan festival dan lomba
4. SOP Pembinaan Marching Band Gita Patriot
5. SOP Jambore Budaya tingkat Kota Bekasi
6. SOP Pemilihan Abang Mpok Bekasi
7. SOP Gelar Budaya Tingkat ecamatan
8. SOP Pemeliharaan Cagar Budaya
9. Rekomendasi kegiatan Seni Budaya
10. Pengisi Acara Kesenian

**Urusan Pariwisata :**

1. SOP Tim Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2. SOP Data Perijinan Pelaku Ussaha Pariwisata
3. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
4. SOP Rekomendasi Kegiatan Hiburan Isidential
5. SOP Monitoring Pelaku Ussaha Kepariwisataan dan Hiburan Umum
6. SOP Pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataan dan Hiburan Umum
7. SOP Laporan Kunjungan Tamu
8. SOP Pendataan berdasarkan Instruksi Wali Kota No. 973.10
9. SOP Pendataan Pelaku Usaha Kepariwisataan dan Hiburan Umum
10. SOP Permohonan TDUP Percepatan
11. SOP Penataan Pedagang Kuliner
12. SOP Pemberdayaan Masyarakat

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota No 82 Tahun 2016 merupakan dinas yang menyelenggarakan pemerintahan urusan pariwisata dan kebudayaan dan mulai melaksanakan tugasnya pada tahun 2017, yang sebelumnya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Bekasi. Didalam pelaksanaan tugasnya program yang di emban dari RPJMD 2013 – 2018 ada 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penataan dan pengembangan kawasan wisata, Pembinaan pelaku usaha jasa kepariwisataan, Promosi seni budaya dan pariwisata, Penyelenggaraan festival seni budaya tradisional maupun kontemporer, Pembinaan terhadap sanggar sanggar seni budaya tradisional Bekasi, Ikut serta dalam pelaksanaan event yang dilaksanakan tingkat propinsi maupun nasional, Pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mendukung tercapainya target indikator sasaran maupun indikator program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwsata dan Kebudayaan maupun RPJMD Kota Bekasi.

### 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Indikator yang di ukur adalah indikator urusan pariwisata dan kebudayaan baik yang masih bergabung dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan tahun 2014-2016 maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2017 – 2018 walaupun ada perbedaan pada indikator awal, capaian indikatornya diakumulasikan pada indikator tahun 2017 karena pelaksanaan programnya tidak mengalami perubahan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 2.9**
**Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
**Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023**

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Jumlah Kawasan wisata yang ditata | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Jumlah Kunjungan Wisatawan | | | 925.883 Orang | 944.400 Orang | 963.288 Orang | 982.553 Orang | 1.002.204 Orang | 10.068.125 Orang | 243.410 Orang | 282.597 Orang | 864.806 Orang | 0 | 2% | 2% | 2% | 2% | 0 |
| 3 | Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataan | | | 0 | 75 Orang | 75 Orang | 150 Orang | 150 Orang | 75 Orang | 75 Orang | 75 Orang | 150 Orang | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | | 3 Situs | 3 Situs | 4 Situs | 4 Situs | 5 Situs | 3 Situs | 3 Situs | 2 Situs | 4 Situs | 0 | 100% | 100% | 50% | 100% | 0 |
| 5 | Jumlah Penyenggaraan Event Bekasi Kreatif | | | 8 Event | 5 Event | 7 Event | 9 Event | 11 Event | Event | Event | 13 Event | 54 Event | 0 | 100% | 100% | 163% | 600% | 0 |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Indikator **Jumlah cagar budaya, situs yang dilestarikan** adalah indikator yang mengukur jumlah cagar budaya, situs dan monumen yang dilaksanakan perawatan sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi No. 431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011 tentang Penetapan Benda Bersejarah di Kota Bekasi, dengan jumlah 8 situs cagar budaya yang harus di rawat setiap tahun. Di RPJMD/RENSTRA target cagar budaya, situs dan monumen yang dipelihara adalah 8 (delapan) unit sesuai dengan Keputusan Walikota, pada pelaksanaannya pemeliharaan terhadap cagar budaya, situs dan monumen setiap tahun disesuaikan dengan alokasi anggaran. Capaian kinerja adalah : Untuk tahun 2015 dilaksanakan pmeliharaan cagar budaya 3 situ, kemudian pada tahun 2016 dilaksanakan pemeliharaan 3 situs, dan pada tahun 2017 sejumlah 4 situs. Tetapi pada prinsipnya ke 8 (delapan) situs cagar budaya dimaksud sudah dilaksanakan pemeliharaan selama jangka waktu RPJMD yaitu :

- Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi lokasi Stasiun Bekasi
- Tugu Pahlawan lokasi Jl. Veteran
- Gedung Papak lokasi J. Ir. H. Juanda
- Tugu Agus Salim lokasi GOR Bekasi
- Sumur Binong lokasi Kecamatan Jatiasih
- Sumur Batu lokasi Kecamatan Bantar Gebang
- Sumur Bandung lokasi Kecamatan Jatisampurna
- Rumah Adat lokasi Kecamatan Jatisampurna.

Indikator **Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya** adalah indikator yang mengukur jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan target 1 (satu) gedung indoor dan 1 (satu) gedung outdoor. Target 1 (satu) gedung indoor telah tercapai pada tahun 2017 yang berlokasi di Situ Rawa Gede Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu. Yang belum tercapai adalah 1 (satu) gedung outdoor karena lokasi di Lapangan Multiguna Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur pada tahun 2016 ditetapkan sebagai stadion mini Bekasi Timur sehingga dilaksanakan pembangunan stadion mini.

Indikator **Jumlah objek wisata** adalah indikator yang mengukur jumlah objek wisata yang ditata, yang di mulai dari penyusunan kajian (fisibility study), perencanaan kegiatan : master plan dan DED , sampai dengan pembangunan kawasan wisata dengan penggunaan anggaran multi year, sehingga untuk pembangunan satu kawasan wisata memerlukan beberapa

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

tahun anggaran. Target yang ditetapkan 2 kawasan adalah selama periode renstra 2013 – 2018 dapat dibangun 2 kawasan wisata yang siap kunjung.

Indikator **Jumlah media informasi promosi** adalah indikator yang mengukur jenis-jenis promosi tiap tahun yang dibuat yaitu : media cetak, media elektronik, audio visual, media online, videotron, dll.

Indikator **Indek Kepuasan Masyarakat** adalah indikator yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas kepada stakeholder seperti : sanggar seni tradisional, pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, hiburan umum), dll. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat tetapi melalui DPMPTSP, pemberian rekom kepada pelaku jasa usaha pariwisata disampaikan kepada DPMPTSP melalui berkas yang disampaikan DPMPTSP bukan dari masyarakat penerima pelayanan. Survey Indek Kepuasan Masyarakat baru dilakukan pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No.82 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pariwiata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Indikator **Nilai Evaluasi AKIP** adalah indikator yang mengukur akuntabilitas kinerja Dinas melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akip oleh Inspektorat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baru terbentuk tahun 2017, dan sebelumnya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan.

### 2.3.2 Capaian Kinerja Antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Periode sebelumnya

Kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi meliputi 2 urusan pemerintahan :

1. **URUSAN PARIWISATA**

   Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pelaku jasa usaha kepariwisataan, penataan dan pengembangan kawasan wisata kuliner dan penataan wisata air. Indikator sasaran yang pada RPJMD 2013 - 2018 adalah : Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

   Realisasi capaian target selama lima tahun periode RPJMD ke IV

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**

**REALISASI CAPIAN TARGET INDIKATOR SASARAN RPJMD 2013-2018**

| NO | INDIKATOR SASARAN | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah | 12,90 % | | 13,00 % | | 14,41 % | 15,65 % | 15,97 % | 17,46 % | 17,70 % | 21,64 |
| 2 | Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 GO | 0 | 0 | 1 GI | 1 GI | 1 GI |

Indikator **Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah** merupakan indikator yang mengukur persentase penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan umum terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2016/2017 realisasi melibihi target dan cenderung ada peningkatan dari tahun ke tahun penerimaan pajak sektor pariwisata.

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi. Pada **tahun 2016** target PAD sebesar 14,41 % (Rp. 243.047.776.108) dan realisasinya 15,65 % ( Rp. 263.899.672.561) terdapat pertumbuhan sebesar 1,42% (Rp. 20.851.896.453). Pada **tahun 2017** target PAD sebesar 15,97% (Rp. 282.076.491.392) dan realisasinya 17,46 % (Rp. 308.437.146.327) terdapat pertumbuhan sebesar 1,49 % (Rp. 26.360.654.935). Dan pada **Tahun 2018** target PAD dari sektor pariwisata sebesar 17,70 % (Rp. 280.826.609.911) dan realisasinya sebesar 21,64 % ( Rp.343.338.295.959) melampaui target sebesar 3,94 % (Rp. 62.511.686.048).

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Indikator **Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya** merupakan indikator yang mengukur jumlah tempat penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan target 1 (satu) gedung indoor dan 1 (satu) gedung outdoor.Realisasinya sampai dengan tahun 2017 terbangun 1 (satu) gedung indoor yang berlokasi di Situ Rawa Gede Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu. Untuk gedung outdoor sampai saat ini belum terealisasi disebabkan lokasi yang ditetapkan sebagai gedung outdoor di Lapangan Multiguna, oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan sebagai stadion mini Kecamatan Bekasi Timur.

**Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan antara lain :**

1. Promosi pariwisata melalui media sosial, media eletronik, media cetak, leaflet/brosur dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata;
2. Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata ( PHRI, ASITA , dll);
3. Pembinaan kepada pelaku jasa usaha kepariwisataan dan hiburan umum;
4. Penyelenggaraan event festival seni budaya Bekasi.

Upaya yang telah dilaksanakan berdampak secara tidak langsung terhadap peningkatan investasi sarana wisata terutama pada perkembangan pembangunan hotel dan restoran di Kota Bekasi. Pertumbuhan investasi bidang perhotelan berkembang pesat pada tahun 2015 – 2017 dengan dibangunnya hotel hotel berbintang antara lain : Hotel Horison, Hotel Aston, Hotel Haris, Hotel Santika, Hotel Amarosa, dll.

Adapun langkah langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meningkatkan potensi pariwisata daerah antara lain :

1) Penciptaan kawasan wisata kuliner yang berlokasi di Jl. Terusan Asrama Haji, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan;
2) Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner di Danau Duta Harapan Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
3) Penyusunan Fisibility Study Kawasan Wisata Curug Parigi;
4) Pembuatan Master Plan Kawasan Wisata Situ Rawa Gede;
5) Penyusunan Naskak Akademik raperda kepariwisataan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## 2. URUSAN KEBUDAYAAN

Di dalam melaksanakan pelayanan urusan kebudayaan dan kesenian kepada masyarakat langkah langkah yang telah dilakukan antara lain : memfasilitasi kegiatan kesenian yang dilakukan oleh masyarakat, pemeliharaan terhadap cagar budaya, situs dan monumen, pelestarian kesenian tradisional, pemberian anugrah kepada budayawan/seniman, pemberian anugerah kepada kuncen cagar budaya dan situs bersejarah, memberikan pembinaan kepada sanggar seni tradisional untuk dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat, penyelenggaraan festival seni budaya daerah dan seni kontemporer, fasilitasi keikutsertaan sanggar seni tradisional dalam event propinsi maupun nasional, promosi seni budaya ke luar daerah dan mendorong motivasi masyarakat untuk meningkatkan kreasi seni budaya tradisional agar dapat bersaing dengan seni budaya modern.

Sebagai pelestarian pembangunan budaya daerah sangat dibutuhkan sarana penyelenggaraan festival seni budaya sebagai tempat para seniman/budayawan untuk berkreasi, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi telah bekerja sama dengan PHRI agar penyelenggaraan festival seni budaya dapat dilaksanakan di hotel, mall, dan restoran.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013 -2018 bahwa indikator sasaran urusan kebudayaan adalah Sarana Penyelenggaraan festival seni budaya yang representatif. Dan pada tahun 2017 pembangunan gedung kesenian telah selesai dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang berada di lokasi Kawasan Wisata Air Situ Rawa Gede. Gedung kesenian tersebut telah diserah terimakan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (dulu Disbangkim) kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2018, dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan dan penggunaan gedung kesenian (gedung indoor) ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Target pada RPJMD 2013 – 2018 Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah : 1 (satu) gedung indoor dan 1 (satu) gedung outdoor. Untuk gedung outdoor adalah lapangan Multiguna yang berlokasi di Kelurahan Bekasi Jaya , Kecamatan Bekasi Timur yang juga merupakan Stadion Mini Kecamatan Bekasi Timur, yang sampai saat ini masih menunggu Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lapangan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Multiguna sebagai tempat kreasi para seniman dan budayawan.

**Tabel 2.11**
**REALISASI CAPAIAN TARGET INDIKATOR PROGRAM RPMJD/RENSTRA 2013-2018**

| NO | PROGRAM | INDIKATOR SASARAN | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA | Penyelenggraan festival seni budaya | 7 event | 9 event | 8 event | | 9 event | 13 event | 10 event | 16 event | 11 event | 17 event |
| | | Cakupan cagar budaya, situs dan monumen yang dilestarikan | 50 % | - | 60 % | 37,5% | 70 % | 50 % | 80 % | 50 % | 100% | 100 % |
| 2 | PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | Persentase kawasan wisata milik pemerintah yang tertata | 10 % | 10 % | 60 % | 25 % | 80 % | 40 % | 90 % | 60 % | 100% | 60 % |
| | | Persentase usaha jasa pariwisata yang berijin | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 30 % | 29 % | 35 % | 30 % | 40 % | 40 % |

Indikator **Penyelenggaraan festival seni dan budaya** adalah indikator yang mengukur jumlah festival seni budaya baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun yang dilaksanakan oleh Kecamatan atau organisasi masyarakat (kelompok masyarakat) yang berkoordinasi dengan dinas dan keikut sertaan pada event yang dilaksanakan oleh tingkat propinsi dan nasional. Realisasi capaian setiap tahunnya cenderung meningkat.

Indikator **"Cakupan cagar budaya, situs dan monumen yang dilestarikan"** adalah indikator yang mengukur persentase cagar budaya, situs dan monumen yang dipelihara/dirawat pada setiap tahun anggaran sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi No : 431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011 tentang Penetapan Benda Bersejarah di Kota Bersejarah, sebagai berikut :

- Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi lokasi Stasiun Bekasi
- Tugu Pahlawan lokasi Jl. Veteran

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

- Gedung Papak lokasi J. Ir. H. Juanda
- Tugu Agus Salim lokasi GOR Bekasi
- Sumur Binong lokasi Kecamatan Jatiasih
- Sumur Batu lokasi Kecamatan Bantar Gebang
- Sumur Bandung lokasi Kecamatan Jatisampurna
- Rumah Adat lokasi Kecamatan Jatisampurna.

**Realisasinya** : Pada tahun 2014 kegiatan pemeliharaan cagar budaya tidak mendapat anggaran, tahun 2015 dilaksanakan pemeliharan 3 situs, tahun 2016 dilaksanakan pemeliharaan 4 situs dan tahun 2017 dilaksanakan pemeliharaan 4 situs.

Indikator **"Persentase Kawasan Wisata Milik Pemerintah yang Tertata"** adalah indikator yang mengukur persentase kawasan wisata yang sudah dilakukan penataan oleh dinas, adapun kawasan yang akan ditata adalah : Situ rawa Gede, Curug Parigi, Kawasan Wisata kuliner di Jl Terusan Asrama Haji dan Kawasan Wisata Kuliner di Danau Duta Harapan.

Realisasinya : Pada tahun 2015 dibangun Kawasan Wisata Kuliner Jl. Terusan Asrama Haji, pada tahun 2016 dibuat masterplan Situ Rawa Gede dan pada tahun 2017 dibuat Fisibility study(FS) Curug parigi dan Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan.

Indikator **"Persentase usaha jasa pariwisata yang berijin"** adalah indikator yang mengukur persentase pelaku usaha yang sudah berijin antara lain meliputi : usaha jasa perhotelan, usaha rumah makan/restoran dan usaha jasa hiburan umum, dan lain lain. Persentase usaha jasa kepariwisataan yang berijin dihitung dari jumlah perpanjangan ijin rekom yang terdaftar di bidang pariwisata per tahun.

Realisasi : Pada tahun 2017 pelaku jasa usaha pariwisata yang memperpanjang ijinnya sejumlah 662 pelaku usaha dari 2221 jumlah keseluruhan pelaku usaha jasa pariwisata atau 30 %.

**Capaian Realisasi Anggaran** Dalam rangka mencapai sasaran program sebagaimana telah dijelaskan diatas, berikut merupakan capaian realisasi anggaran dari tahun 2013 – 2018:

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 2.12**
**Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2018-2023**

| NO | Program | Target | | | | | Realisasi | | | | | Rasio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| *-1* | *-2* | *-5* | *-6* | *-7* | *-8* | *-9* | *-10* | *-11* | *-12* | *-13* | *-14* | *-15* | *-16* | *-17* | *-18* | *-19* |
| 1 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 690.000.000 | 740.000.000 | 790.000.000 | 193.179.000 | 850.000.000 | 585.000.000 | 701.340.000 | 784.611.000 | .38,6% | 85% | 84,78% | 94,77% | 99,31% |
| 2 | Program Pemasaran Pariwisata | 500.000.000 | 610.000.000 | 340.000.000 | 370.000.000 | 800.000.000 | - | 400.000.000 | 182.765.000 | 250.000.000 | 657.406.000 | - | 65,57% | 53,75% | 67,56% | 82,17% |
| 3 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | - | - | - | 180.000.000 | 250.000.000 | - | - | - | 71.930.000 | 232.110.000 | - | - | - | 39,92% | 92,80% |
| 4 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 1.250.000.000 | 1.520.000.000 | 700.000.000 | 720.000.000 | 740.000.000 | 842.666.400 | 100.000.000 | 300.000.000 | 650.000.000 | 663.600.000 | 67,45% | 6,57% | 42,85% | 90,27% | 89,67% |
| 5 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | - | 3.000.000.000 | 350.000.000 | 360.000.000 | 970.000.000 | - | 2.350.000.000 | 150.000.000 | 354.860.000 | 800.176.500 | - | 78,33% | 42,85% | 98,57% | 82,49% |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Pada tahun 2020 untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata rasio anggaran sebesar 85% dan Program Pemasaran Pariwisata rasio anggarannya sebesar 67,57%

Kemudian tahun 2021 untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif rasio anggarannya sebesar 0% karena program tersebut baru ada diperubahan RPJMD pada tahun 2021 dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif rasio anggarannya sebesar 39,92% pada tahun 2022.

Perbedaan rasio anggaran dari tahun ke tahun disebabkan beberapa faktor antara lain : Penerimaan pendapatan daerah yaitu PAD, prioritas pertahun yang berbeda pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kinerja dinas didalam merumuskan rencana kerja per tahun dan kesungguhan perangkat daerah didalam merespon kebijakan pimpinan yang dimasukan kedalam program dinas.

## 2.4 Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pariwisata perlu adanya terobosan pemerintah daerah mengingat belum adanya objek wisata alam di Kota Bekasi agar masyarakat dapat berwisata di Kota Bekasi. Hal ini dimaksudkan agar dana dari masyarakat yang di belanjakan di bidang pariwisata tidak mengalir ke luar daerah Bekasi.

Di dalam rangka pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi akan membuat langkah-langkah untuk menciptakan tempat tempat wisata perkotaan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di rencanakan di buat tempat wisata.

Untuk mewujudkan rencana pemerintah terdapat beberapa hambatan yang harus diantisipasi antara lain :

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan;
2) Kondisi wisata budaya belum siap kunjung;
3) Belum terbangunnya kawasan wisata alam
4) Alokasi anggaran dari APBD yang sangat minim.
5) Belum terimigrasi dan terkordinasi antar OPD yang terkait dalam pengembangan pariwisata

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

6) Masih terdapat tumpang tindih tupoksi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif

Beberapa hal yang menjadi permasalahan pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan antara lain :

a. Belum adanya objek wisata alam;
b. Mulai tergerusnya budaya Bekasi oleh budaya luar Bekasi;
c. Diperlukan suatu kebijakan umum daerah yang diarahkan kepada peningkatan potensi-potensi bidang pariwisata dan kebudayaan potensial di Kota Bekasi;
d. Terbatasnya sarana prasarana pendukung, baik sarana prasarana infrastruktur terutama bidang seni/budaya dan pariwisata serta perlunya pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur yang profesional;
f. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif baik pada dinas terkait maupun bidang pariwisata dan kebudayaan;
g. Belum dilakukan sistem pemetaan potensi dan pola strategi pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi secara komprehensif.
h. Belum adanya branding yang dikenal secara luas
i. Tergarisnya kalender event yang dilaksanakan.

Beberapa hal yang menjadi peluang dalam mengembangkan bidang pariwisata dan kebudayaan antara lain :

a. Tumbuhnya komunitas pelaku ekonomi kreatif;
b. Trend pemanfaatan teknologi informasi yang cukup tinggi;
c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan kearifan lokal.

## BAB III
## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

## 3.1 Identifikasi Permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengkoordinasian kebijakan pelayanan di bidang kebudayaan, kepariwisataan, pengembangan kesenian dan pemasaran, berbagai kegiatan penting dan strategis di masing-masing bidang tersebut baik yang bersifat fisik maupun non fisik selalu diusahakan dan ditingkatkan sesuai dengan skala prioritas guna meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap 4 (empat) bidang tersebut sehingga dapat membentuk karakter bangsa yang sehat dan tangguh. Upaya untuk meningkatkan hal tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala diantaranya :

1. **Bidang Kebudayaan**

   Permasalahan kebudayaan yang tengah dihadapi oleh Negara – Negara berkembang seperti Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di belahan bumi ini adalah terjadi perubahan kebudayaan yang begitu cepat sebagai akses dari derasnya arus modernisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

   Perkembangan masyarakat yang cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut perkembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga dalam era otonomi daerah pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

   Perlu banyak upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan kebudayaan lokal agar tidak musnah seiring dengan perkembangan zaman dan arus modernisasi. Upaya yang telah dilakukan olah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan lokal masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun mudah-mudahan dapat menyelamatkan unsur-unsur kebudayaan yang kini tengah diambang kepunahan. Permasalahan yang dihadapi oleh bidang

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Masih minimnya organisasi masyarakat yang berkecimpung di bidang kebudayaan yang merupakan mitra kerja pemerintah daerah. Di Kota Bekasi hanya terdapat 4 Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Hal masih kurang mampu mendukung pencapaian tujuan dan memberikan warna kebudayaan di Kota Bekasi.

**Tabel 3.1**

**Data Organisasi Seni dan Budaya**

| NO | NAMA ORGANISASI | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Dewan Kesenian Bekasi (DKB) | By Pass Fly Offer |
| 2 | Ikatan Seni Tradisional Kota Bekasi (IKA SENTRA) | Jl. Veteran (Alun-alun Bekasi) |
| 3 | Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) | Jl. Ir. H. Juanda |
| 4 | Forum sanggar seni tradisional | Kecamatan Jatisampurna |

2. Kurangnya informasi baik melalui media cetak, media tulis sebagai sarana penunjang pengetahuan tentang kebudayaan untuk mengenalkan kebudayaan pada tataran pendidikan di sekolah sekolah dan untuk masyarakat luas. Media cetak/ buku yag diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sejak tahun 2011 baru di susun sebanyak 11 judul buku dan jumlah ini masih belum mencukupi kebutuhan terutama pada tataran pendidikan, selain itu buku yang telah disusun tersebut dicetak dalam jumlah yang sedikit dibandingkan jumlah sekolah yang ada di Kota Bekasi. Adapun data judul buku yang disusun/ diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

**Tabel 3.2**

**Data Buku Sejarah Dan Budaya Bekasi**

| NO | JENIS BUKU | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamus Dialek Bekasi | Cetakan II | Cetakan III | Cet. IV |
| 2 | Pantun Bekasi | Cetakan I | - | Cet. II |
| 3 | Sejarah dan Budaya Kota Bekasi | - | Cetakan II | Cet. III |
| 4 | Kamus Bahasa dan Tafsir Melayu Betawi (Bekasi) | Cetakan II | Cetakan III dan IV | - |
| 5 | Bunga Rampai Budaya Kota Bekasi | - | - | - |
| 6 | Penyusunan buku pelestarian adat budaya daerah | - | - | - |

| NO | JENIS BUKU | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Cagar Budaya Kota Bekasi | - | - | Cetakan I |
| 8 | Kamus Bahasa Melayu Betawi | - | - | Cetakan IV |
| 9 | Prabotan Tradisional Bekasi | - | - | Cetakan I |
| 10 | Semur Jengkol Cinta Made in Belanda | - | - | Cetakan I |

3. Kawasan cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dikarenakan kondisinya yang belum siap kunjung. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pendataan benda situs, cagar budaya atau monumen atau benda yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan dan didapat hasil 79 benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi. Pada masa RPJMD 2013-2018 telah dilaksanakan pemeliharan terhadap 8 cagar budaya, situs dan monumen sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi No. 431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011 tentang Penetapan Benda Bersejarah di Kota Bekasi. Mengingat urusan pelestarian budaya terutama pemeliharaan benda cagar budaya menjadi kewajiban pemerintah daerah maka dikeluarkan Keputusan Wali Kota Bekasi No. 430/Kep.321-Disparbud/VII/2018 tentang Penetapan Tempat dan Bangunan Bersejarah di Kota Bekasi dengan lampiran sebagai berikut :

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 3.3**
**Data Benda Cagar Budaya Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tentang Tempat dan Bangunan Bersejarah di Kota Bekasi**

| NO | NAMA BENDA CAGAR BUDAYA | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Klenteng Hok Lay Kiong | Kec. Bekasi Timur |
| 2 | Makam Tubagus Syech Muhidin | Kec. Jatiasih |
| 3 | Makam Ratu Mayang Sari | Kec. Jatiasih |
| 4 | Makam Ringin | Kec. Jatiasih |
| 5 | Makam Kyai Kondang Jati Kramat | Kec. Jatiasih |
| 6 | Makam Bambu Kuning | Kec. Rawalumbu |
| 7 | Masjid dan Makam Keramat Syech Muhamad Suhaemi | Kec. Bekasi Utara |
| 8 | Rumah Adat Imah Panggung Kranggan | Kec. Jatisampurna |
| 9 | Makam Mbah Raden | Kec. Jatisampurna |
| 10 | Sumur Keramat Lebak | Kec. Mustikajaya |
| 11 | Makam Keramat Uyut Caringin | Kec. Mustikajaya |
| 12 | Makam Uyut Jawa dan Kitab Kuno | Kec. Mustikajaya |
| 13 | Tugu Tapal Batas | Kec. Mustikajaya |
| 14 | Makam Wa Ecok | Kec. Medan Satria |
| 15 | Makam Kramat Pangeran Mangkubumi (Kumpi Mang) | Kec. Medan Satria |
| 16 | Makam Benda | Kec. Jati Asih |
| 17 | Masjid Tua Nurul Huda Jati Makmur | Kec. Pondok Gede |
| 18 | Tugu Revolusi | Kec. Bekasi Selatan |
| 19 | Rumah Adat Olot Nesan | Kec. Jatisampurna |

4. Generasi muda banyak yang tidak mengenal budaya dan sejarah perjuangan Bekasi.

   Di dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain :

   1. Pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, situs dan monumen yang ada di Kota Bekasi beberapa diantaranya kepemilikan tanahnya adalah milik warga.
   2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kuncen yang menjaga atau yang merawat benga cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

3. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebudayaan.

**2. Bidang Pengembangan Kesenian**

Bidang Pengembangan Kesenian merupakan bidang yang mempunyai tugas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi seni tradisi, seni kontemporer serta sarana dan prasarana untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya (Perwal Kota Bekasi No.82 tahun 2016) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Jenis kesenian yang dilestarikan di Kota Bekasi antara lain : seni tari, seni music, seni suara, seni wayang dan seni tradisi.

Di dalam menjalankan tupoksi tersebut, bidang kesenian dan kebudayaan mengalami permasalahan yaitu :

a. Masyarakat Bekasi lebih menyukai menonton budaya modern yang berasal dari luar melalui perkembangan informasi teknologi yang sangat cepat dan dapat diakses dengan mudah, contohnya adalah teknologi digital yang berkembang pesat yang dapat mengakses baik itu budaya dari luar negeri, film, peristiwa atau kejadian yang terjadi di belahan dunia manapun;
b. Kondisi sanggar sanggar tradisional perlu mendapatkan support dari pemerintah daerah karena banyak sanggar sanggar yang tidak berkembang dikarenakan persaingan yang ketat, atau punah. Karena untuk mendorong berkembangnya budaya daerah (Bekasi) pemerintah daerah wajib memfasilitasi sanggar sanggar seni budaya tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang, baik dari rehabilitasi sanggar nya maupun fasilitasi pemasarannya melalui penyelenggaraan festival / lomba seni dan budaya daerah. Adapun sanggar yang tidak berkembang terdapat 21 (dua puluh satu) sanggar seni budaya dan yang punah terdapat 4 (empat) sanggar.

   Dan sanggar yang aktif pada tahun 2018 - 2021 adalah sebagai berikut :

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 3.4**

**Data Sanggar Kesenian yang aktif**

| NO | NAMA SANGGAR | PIMPINAN | NAMA KESENIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayang Ajen | Dini Irma Damayanti, S.Sn | Wayang Golek Ajen dan Seni Sunda |
| 2 | Putra Budaya | Arsadi Sudirman | Tari Topeng dan Musik |
| 3 | Pesona Laras | Suparman | Keroncong Asli Campur Sari |
| 4 | Sumber Jaya | Kenjon | Topeng Bekasi |
| 5 | Nyimeh Putra | Bohim | Topeng Bekasi |
| 6 | Seli Asih | Naman/Karsa | Topeng Bekasi |
| 7 | Setia Bersama | Sumardi | Topeng Bekasi |
| 8 | Mandiri Jaya/Cahaya Mustika | Sugio | Jaipong |
| 9 | Chinglung | Handi | Baarongsai |
| 10 | Linggar Pakuan | Nemit | Jaipong |
| 11 | Sanggar Indra Kusuma | Deviana Nur Indrawati | Seni Tari/Diklat |
| 12 | Sanggar Sinar Budaya | Wawan | Jaipong |
| 13 | Duta Kreasi Seni (DKS) | Deden Cahyana | Pembinnaan dan Pengembangan Bakat |
| 14 | Mekar Mandiri | Boin | Seni Karawitan dan Pedalangan |
| 15 | Komara Grup | Amin/Samit | Seni Karawitan |
| 16 | Laras Putbintari | Hartini, S.Pd.,MMPd | Seni Tari |
| 17 | Ich'i Entertaiment | Dewi Sri ayu W | Musik Etnik Kontemporer dan Tari Tradisional |
| 18 | Irma Irama | Eka hendy Hermawan | Ondel-ondel |
| 19 | Trisna Manggala | Yanto Marindi | Tari |
| 20 | Pajajaran | Karyana | Tradisional Jawa Barat |
| 21 | Tirta Budaya | Dedi M. Adi Pradja | Seni Tradisional |
| 22 | Restu Kesepuhan | Bkp. J.Y.Ogan | Seni Pencak Silat |
| 23 | Jasmine | Fatimah | Seni Tari |
| 24 | Komara Pasundan | Sajum | Seni Pencak Silat |
| 25 | Seni Beladiri | Samen Ardy | Seni Pencak Silat |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| NO | NAMA SANGGAR | PIMPINAN | NAMA KESENIAN |
|---|---|---|---|
| | Laskar Betawi Melati | Winata | |
| 26 | Sanggar Budaya Betawi Bekasi Bocah Ledok | Ridwan Marhid | Seni tari |
| 27 | Sanggar Prasasti | Wazir Nurry | Tari Tradisional |
| 28 | Mekar pasundan | Nina Rustina, SE | Seni tari Tradisional |
| 29 | Pusaka Muda | Deni Saefudin Hidayatullah | Pencak silat |
| 30 | Mekar Wargi 2 | Ahmad Soleh | Wayang Golek |
| 31 | Gita Patriot | Herawati | Musik, Tari, Teater |
| 32 | Citra Mahkota | Titin Sri Sumartini | Tari Sunda |
| 33 | Cipta Budaya Nusantara | Mulyati | Tari Tradisional |
| 34 | Arta | Sri Hartati, S.Pd.I | Tari Kreasi dan Lenog Remaja |
| 35 | PPSDPK | Sukarna Tjamin, S.Pd | Seni Tari dan Pencak Silat |
| 36 | Sasak Djikin | Marvianus | Pencak Silat Betawi dan Teater |
| 37 | Ariesta | Sukatmi | Seni tari Tradisional Nusantara |
| 38 | Kreasi Puspita | Helen Puspita Sari, S.Pd.I | Seni Tari Tradisional Nusantara |
| 39 | Eka Budaya | Eka Yulianti Ermanda, S.Pd | Seni Tari Tradisional Nusantara |
| 40 | Mekar Jaya | Sukarlana | Wayang Kulit Bekasi |
| 41 | Syalwa Nusantara | Nurhayati | Seni Tari Tradisional |
| 42 | Sahabat Sampah Smile Management | Lestya Dewi Ratnawati | Modeling Kostum dan daur ulang sampah |
| 43 | Pandawa | Ridwan Marhid | Seni Rupa, Sastra, Teater |
| 44 | Narashansha | Darul Iqbal Saputa | Tari, Menyanyi, Musik, Lukis |
| 45 | Sanggar Ganesha | Rosmalia | Sanggar Rias |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| NO | NAMA SANGGAR | PIMPINAN | NAMA KESENIAN |
|---|---|---|---|
| 46 | Tunas Jaya | Naman Sanjaya | Topeng Bekasi |
| 47 | Ching Lung | Handi | Barong Shay |
| 48 | Ligar Pakuan | Nemit | Seni Tari Jaipong |
| 49 | Sanggar Ari Pandawa Production Armandira Visa Putra | Ari Arman | Seni Tari dan Modern Dance |
| 50 | Sanggar Tari Rangga Binangkit | Titi Sari | Seni Tari Tradisional |
| 51 | Sanggar ADC Production | Eka Miyati, S.Pd | Seni Tari |
| 52 | Sanggar Pencak Silat Macan Putih JBG 12 | Drs. Samsuri, M.Si | Seni Pertunjukan |
| 53 | Sanggar Setia Bersama | Sumardi | Seni topeng Bekasi |
| 54 | Sanggar Wadah Daya Cipta (WD) | Djoko Histi Maryono | Seni Tari |
| 55 | Sanggar Sekar Tanjung Dance Company | Rury Avianti | Sanggar Tari |

Keterangan :

Data Sanggar adalah data yang diambil dari rekom sanggar tahun 2018 yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang berjumlah 45 sanggar. Data diatas merupakan data sanggar yang aktif pada tahun 2018 dan ada penambahan sanggar pada Tahun 2021 menjadi 55 sanggar. Untuk mengukur kualitas sanggar seni dan budaya dengan monitoring ke tempat Sanggar pertriwulan dan Gelar karya Seni Budaya.

c. Masih minimnya pengrajin alat alat kesenian khas Bekasi dan Kurangnya sarana dan prasarana kesenian merupakan suatu hambatan dalam pelestarian budaya. Untuk itu diperlukan dukungan upaya agar pengrajin alat kesenian dapat tumbuh dan brkembang di Kota Bekasi. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat 4 sanggar seni yang merupakan pengrajin alat kesenian sebagai mana tabel dibawah ini :

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 3.5**

**Data Pengrajin Alat Kesenian**

| NO | NAMA SANGGAR | PIMPINAN | ALAT KESENIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentra Asih | Abdul Rosid | Pembuat Calung dan Angklung |
| 2 | Irma Irama | Andi Suwandi | Pengrajin Ondel-Ondel |
| 3 | Dempet Group | Usman | Pengrajin Ondel-Ondel |
| 4 | Distro Betawi Bekasi | | Pakaian Tradisional Bekasi |

**3. Bidang Kepariwisataan**

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan utama dalam paradigma pembangunan dengan kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi Karena melalui pariwisata dapat berdampak terhadap image building sekaligus market point bagi pengembangan investasi dan anggaran pendapatan daerah.

Sektor pariwisata Kota Bekasi diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian Kota Bekasi untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha serta sumber devisa dengan berbasis sumber daya lokal. Untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada, Kota Bekasi perlu menerapkan pola promosi yang tidak hanya bersifat spasial tetapi lebih bersifat integratif dengan wilayah sekitarnya, Jabodetabek hingga Pusat Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang pariwisata menghadapi kendala antara lain :

1. Masih banyaknya pelaku usaha jasa pariwisata yang belum berijin, berdasarkan data bidang pariwisata terdapat 2221 pelaku jasa usaha pariwisata di Kota Bekasi dan yang telah berijin sejumlah 784 usaha jasa pariwisata sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**

**Data Sarana Hiburan Umum**

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| NO | JENIS USAHA | BERIJIN |
|---|---|---|
| 1 | Catering | 18 |
| 2 | Kolam Renang | 7 |
| 3 | Arena/Sarana Olahraga | 16 |
| 4 | Biliard | 3 |
| 5 | Hotel | 38 |
| 6 | Refleksi/Panti Pijat | 15 |
| 7 | Café | 9 |
| 8 | Pub/Hiburan Malam | 14 |
| 9 | Karaoke | 42 |
| 10 | Arena permainan anak | 27 |
| 11 | Bioskop/Sineplex | 16 |
| 12 | Usaha jasa konvensi,perjalanan insentif/pameran | 48 |
| 13 | Pertunjukan komersial ttt di dalam perjalanan | 3 |
| 14 | Event Organizer | 32 |
| 15 | Salon dan Spa | 26 |
| 16 | Bakery | 18 |
| 17 | Pemancingan | 1 |
| 18 | Restoran/Rumah Makan | 310 |
| 19 | APW/BPW | 141 |
| | **JUMLAH** | **784** |

2. Masih kurangnya aplikasi sistem pendataan kepariwisataan dan kebudayaan (SIDAKBUD) yaitu suatu aplikasi sistem yang menghubungkan pelaku jasa usaha jasa pariwisata dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terutama hotel dengan tujuan untuk memantau kunjungan tamu hotel. Kondisi saat ini baru terpasang di beberapa hotel yaitu : Horison, Santika Mega Bekasi, Santika Harapan Indah, Aston, Ammarosa, Harris, Merapi Merbabu, Amaris, Ciputra Cibubur, Bunga Karang, The Green, Red Planets, sisanya belum terpasang sistem SIDAKBUD. Adapun data hotel di Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**
**Data Hotel di Kota Bekasi**

| NO | JUMLAH HOTEL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Bintang | | | | | |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lima | | | | | |
| 2 | Hotel Bintang Empat | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | Hotel Bintang Tiga | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Hotel Bintang Dua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Hotel Bintang Satu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Hotel Non Bintang | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| | Jumlah dan Tingkat Hunian Hotel/Penginapan | | | | | |
| 8 | Jumlah kamar penginapan hotel/penginapan | 900 | 1000 | 1119 | 1230 | 1353 |
| 9 | Jumlah rata-rata penggunaan kamar hotel/penginapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Jumlah kamar hotel/penginapan yang terisi | 797 | 885 | 983 | 1081 | 1297 |

3. Belum terbangunnya objek wisata alam disebabkan karena belum optimalnya anggaran yang dialokasikan. Potensi pariwisata di Kota Bekasi mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan apabila dilakukan penataan dan pengembangan. Alokasi anggaran untuk pariwisata belum sampai kepada penataan secara fisik disebabkan karena beberapa kendala antara lain : pembangunan fisik bukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, penataan kawasan wisata melibatkan beberapa perangkat daerah (perencanaan lintas perangkat daerah), pembebasan lahan masyarakat disekitar kawasan wisata yang belum dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Adapun data potensi pariwisata yang ada di Kota Bekasi adalah :
4. Pengembangan usaha kepariwisataan belum terintegrasi sehingga dalam pembangunan pariwisata antar OPD dan secara tupoksi ada irisan jalan sendiri-sendiri hal ini dapat dilihat dari tupoksi.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 3.8**

**Potensi objek wisata yang perlu penataan dan pengembangan**

| NO | OBJEK WISATA | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Curug Parigi | Kecamatan Bantar Gebang |
| 2 | Situ Rawa Gede | Kecamatan Rawa Lumbu |
| 3 | Danau Duta Harapan | Kecamatan Bekasi Utara |
| 4 | Situ Rawa Pulo | Kecamatan Jatisampurna |
| 5 | Hutan Bambu | Kecamatan Bekasi Timur |
| 6 | Kalimalang Bekasi | Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan dan Bekasi timur |
| 7 | Kelurahan Budaya | Kecamatan Jati Sampurna |

**4. Bidang Pemasaran**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan diperlukan upaya promosi untuk mengenalkan kepada masyarakat luas yang dilaksanakan oleh bidang pemasaran.Bidang pemasaran mempunyai tugas memasarkan kepada masyarakat tempat tempat wisata, tempat bersejarah, maupun seni dan budaya Kota Bekasi. Tugas yang diemban bidang Pemasaran cukup berat mengingat masih banyaknya kendala yang dihadapi seperti

a. Kurangnya sarana dan prasarana promosi pariwisata antara lain :
   - Billboard yang ditempatkan pada lokasi strategis seperti bandara, stasiun atau terminal, videotron, running text.
   - Kurangnya media cetak seperti banner, brosur dan leaflet

b. Pengalokasian dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya semakin minim , sebagai perbandingan lokasi anggaran untuk urusan pariwisata tahun 2016 - 2018

c. Belum tertatanya objek wisata alam maupun buatan yang dikelola baik oleh pemerintah daerah, potensi objek wisata alam di Kota Bekasi antara lain : Curuq Parigi, Situ Rawa Gede, Hutan Bambu, Danau Duta Harapan, dan Situ Rawa Pulo. Penataan objek wisata alam belum dapat di laksanakan karena kendala tehnis seperti

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

pembebasan tanah, belum terpadunya penataan objek wisata alam diantara dinas dinas terkait, belum teralokasikannya anggaran untuk penataan objek wisata alam/buatan.

d. Kurangnya sarana penyelenggaraan festival seni budaya yaitu berupa gedung kesenian, sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 (satu) gedung kesenian yang berlokasi di Situ Rawa Gede di Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu yang di bangun pada tahun 2017, dan kondisi saat ini belum adanya kelengkapan peralatan gedung.

**Tabel 3.9**
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan**

| NO | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Pengelolaan destinasi wisata belum optimal | Belum adanya objek wisata alam/buatan yang siap kunjung | Tidak tersedianya anggaran untuk pembangunan objek wisata alam/buatan |
| | | | Membangun kawasan wisata merupakan tupoksi dari Disperkimtan |
| | | | Terbatasnya potensi objek wisata alam di Kota Bekasi |
| | | Kurangnya sumber daya manusia bidang kepariwisataan | Belum adanya pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia |
| | | | Belum adanya pamong urusan kepariwisataan |
| 2 | Rendahnya apresiasi terhadap seni, budaya tradisi dan sejarah lokal | Kurangnya sarana dan prasarana kebudayaan | Kurangnya anggaran yang dialokasikan di pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan |
| | | | Tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk rehabilitasi sanggar seni budaya yang tidak berkembang |
| | | Seni budaya Bekasi kurang dapat bersaing dengan budaya modern | Kurangnya minat dari generasi muda untuk merespon seni budaya Bekasi |
| | | | Kurangnya fasilitasi pemerintah daerah untuk penyelenggaraan event |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Kreatifitas sanggar seni budaya belum mampu menandingi kreatifitas budaya modern |

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**Visi Kota Bekasi 2018 – 2023** yaitu **"Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan"**. Mempunyai makna sebagai berikut :

**"Bekasi Cerdas"** bermakna bahwa aparatur pemerintah Kota Bekasi mengaplikasikan layanan kota dan tata kelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan solusi inovatif, integratif dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memfasilitasi kreasi masyarakat dalam menciptakan manfaat sosial dan nilai tambah ekonomi;

**"Bekasi Kreatif"** bermakna bahwa warha Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatifitas, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat dan pelaku usahadalam beraktifitas, berkehidupan dan berusaha;

**"Bekasi Maju"** bahwa pembangunan Kota Bekasi menjadi lebih baik dengan prasarana dan sarana perkotaan untuk memfasilitasi kehidupan warga yang semakin dinamis, kreatif dan inovatif, disini lain kreatifitas dan partisipasi masyarakat juga mendukung perwujudan kota yang semakin maju dengan estetika dan etika kehidupan menuju peradaban yang tinggi;

**"Bekasi Sejahtera"** bermakna bahwa derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera;

**"Bekasi Ihsan"** bermakna bahwa situasi dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplian, ketertiban sosial, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untu mewujudkan kehidupan yang berangkat;

Dari uraian visi diatas kemudian dijabarkan kedalam misi Pemerintah Kota Bekasi yaitu :

1. **Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;**
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasrana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;**
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupankota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kepariwisataan, pemasaran, kebudayaan serta pengembangan kesenian untuk mencapai visi dan misi Dinas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masuk dalam Misi ke 1 yaitu **“ Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik “** dan masuk pada Tujuan ke 1 yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntable**, dengan Sasaran 1.1 **Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.**

misi ke 3 yaitu **“ Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”** dan masuk pada Tujuan ke 3 yaitu : **Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif,** dengan sasaran 6 : **Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif.** Indikator sasaran pada RPJMD adalah **Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif.** Berikut merupakan target pencapaian tujuan dan sasaran dalam indikator dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 3.10**
**Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

| Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Awal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntable** | **Indeks reformasi birokrasi** | 63,49 | 66,28 | 70,05 | 73,25 | 75,00 | 77,00 | 77,00 |
| Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah | Nilai Akip | 63 (B) | 64 (B) | 66 (B) | 68 (B) | 70 (BB) | 72 (BB) | 72 (BB) |
| **Tujuan 3 Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **5.73%** | **5.73 %** | **5.90 %** | **6.10 %** | **6.30 %** | **6.50 %** | **6.50%** |
| Sasaran 3.3 Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif | N/A | N/A | 5% | 7% | 11% | 15% | 15% |

Dari 5 misi Pemerintah Kota Bekasi diterjemahkan ke dalam 45 program prioritas pembangunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada pada program prioritas :

1. Pengembangan **"urban tourism"** untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
2. Penguatan **keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya** dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.

Kaitannya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan adalah untuk meningkatkan kreatifitas jasa kepariwisataan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

dan kebudayaan untuk menjadikan **Kota Bekasi sebagai tujuan wisata kreatif dan budaya di Jawa Barat**.

**Tabel 3.11**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| **VISI : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih** | **Permasalahan Pelayanan SKPD** | **Faktor** | |
| | | | **Penghambat** | **Pendorong** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Misi 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik | | | |
| 2 | Misi 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing | | | |
| | Program : | | | |
| | 1. Pengembangan "urban tourism" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi | 1. Belum tertatanya objek wisata alam dan buatan | 1. Alokasi dana yang minim | 1. Adanya PERDA tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) |
| | | 2. Wisata budaya belum siap kunjung | 2. Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pariwisata/budaya | 2. Perekonomian Kota Bekasi yang cukup berkembang |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial dan kearifan budaya dalam mem bentuk kehidupan sosial budaya Multikul tur dan kehidupan yang ihsan. | 1. Data base yang berhubungan dengan urusan kebudayan masih sangat minim | 1. Alokasi dana yang minim | 1. Tersedianya gedung kesenian |
| | | | 2. Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan kebudayaan | 2. Terbentuknya tim 10 kebudayaan |
| | | | | 3. Tersusunnya pokok pokok pikiran kebudayaan |

### 3.3 Telaahan Renstra KL terkait dan Renstra Dinas terkait di tingkat Provinsi

**A. Urusan Kebudayaan**

Urusan Kebudayaan dan Kesenian yang terdapat dalam rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan **rencana strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan** dan merupakan implementasi dari misi ke 4 (empat) yaitu;

"Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa"

Dan tujuan ke 2 (dua) dari Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

"Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan"

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pelestarian budaya daerah baik seni budayanya maupun pelestarian terhadap benda situs cagar budaya.

Selain itu Rencana Strategis Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mempedomani **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat 2018 – 2023** pada strategi : Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat memperluas tingkat partisipasi dan kolabrasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan melalui arah kebijakan : **Meningkatkan pelestarian dan pengakuan atas seni dan budaya lokal.**

**Tabel 3.12**

**Faktor Penghambat dan Pendorong**

| No | Target Renstra | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) | **- belum tertatanya destinasi wisata khususnya destinasi alam** | **Mudahnya akses menuju kota bekasi** |
| 2 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) | **- terbatasnya even budaya yang diselenggarakan** | **berkembangnya pelaku kreatif** |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata | **Masih rendahnya Kesadaran masyarakat akan pengembangan pariwisata sebagai suatu ekosistem** | **Berkembangnya pembagunan kota bekasi menjadi Kota metropolis** |
| 4 | Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan | **Terbatasnya SDM dalam mengemas kebudayaan menjadi sesuatu yang ekonomis** | **Berkembangnya media informasi dan sarana berkreasi** |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah | **Terbatasnya SDM dalam melaksanakan kegiatan Dinas** | **Berkembangnya potensi yang ada di Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 3.13**
**Komparasi Capaian Sasaran renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L**

| NO | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra Disparbud Kota Bekasi | Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi | Sasaran pada Renstra K/L |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Jumlah kunjungan wisatawan | 907.729 orang | | 1. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) |
| 2 | Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan | 2 kawasan | | Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata |
| 3 | Persentase cagar budaya dalam kondisi baik | 60% | | Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan |
| 4 | Persentase sanggar seni budaya yang aktif | 70% | | |

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kota Bekasi memiliki berbagai kawasan pariwisata dan situs- situs kebudayaan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan RT RW Kota Bekasi tahun 2018-2023 seluruh kawasan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata wilayah yang ditetapkan didalamnya.

Rencana Kawasan Peruntukan Kawasan Pariwisata di Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan PKPW (Peruntukan Kawasan Pariwisata Wilayah) Utara (zona Kawasan Budaya dan Olahraga);

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

- Pengembangan sub PKPW – 1 (Green – City) lokasi Bekasi Selatan dan Bekasi Timur
- Pengembangan Sub PKPW – 2 (Sport-Culture Touris Park) lokasi Bekasi Utara dan Medan Satria
- Pengembangan Sub PKPW U-3 (Shoping, Cullnary, MICE) lokasi Bekasi Barat dan Pondok Gede
- Pengembangan Sub PKPW U-4 (Spot-Culture Tourism ) lokasi Rawa Lumbu dan Mustika Jaya

b. Pengembangan PKPW Selatan (zona kawasan edukasi)
- Pengembangan Sub PKPW S-1 (education rural tourism park) lokasi Kecamatan Pondok Melati
- Pengembangan Sub PKPW S-2 (education-agro tourism) Kecamatan Jati Sampurna
- Pengembangan Sub PKPW S-3 (education-fruit park) Kecamatan Jatiasih
- Pengembangan Sub PKPW S-4(eco park) Kecamatan Bantar Gebang.

## 3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun dokumen KLHS Kota Bekasi yang berlaku sampai dengan saat ini sebagaimana peraturan daerah No. Tahun Dalam dokumen tersebut hal yang terkait dengan tupoksi dinas dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mempromosikan dan melestarikan warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah “Jumlah Kota Pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil” dengan target yang ditetapkan untuk indikator tersebut.

Untuk mencapai target tersebut permasalahan yang di hadapi Kota Bekasi adalah belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di Kota Bekasi. Disamping prmasalahan tersebut, faktor pendorong untuk mencapai tujuan adalah Kota Bekasi memiliki benda situs, kawasan cagar budaya, situ dan pengembangan wisata buatan, maka perlu upaya untuk melestarikan serta mengembangkan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Selanjutnya dalam dokumen KLHS merekomendasikan untuk pengembangan pariwisata adalah :

- Pengembangan Pariwisata yang ada di Kota Bekasi
- Pengembangan kawasan budaya dan olahraga
- Pengembangan kawasan edukasi
- Pengembangan wisata bisnis perkotaan dengan daya tarik belanja, wisata kreatif, rekreasibuatan wisata konferensi
- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung objek-objek wisata

## 3.6 Isu- Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

### 1. Bidang urusan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa stakeholder di antaranya: (a) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi; (b) Dewan Kesenian Kota Bekasi; (c) Pelaku Seni-Budaya Tradisional/Modern; (d) Tokoh masyarakat Bekasi, permasalahan yang dihadapi di dalam melestarikan seni budaya Bekasi adalah sebagian besar generasi muda Kota Bekasi tidak mengetahui sejarah perjuangan Kota Bekasi hal ini disebabkan kurang tersosialisasinya sejarah perjuangan Kota Bekasi, selain itu benda situs cagar budaya juga belum tersosialisasi dengan baik. Menjadi tugas pemerintah agar masyarakat Kota Bekasi mengetahui budaya Kota Bekasi melalui sejarah perjuangan Kota Bekasi. Bidang Kebudayaan mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan nilai tradisional serta bahasa, sastra dan aksara daerah. Nilai nilai sejarah yang ada di Kota Bekasi yang berupa situs cagar budaya yang tersebar di 12 Kecamatan perlu pemeliharaan dan penataan didalam rangka melestarikan nilai nilai sejarah. Selain benda situs cagar budaya diperlukan adanya tempat/wadah benda benda bersejarah yang ada di Kota Bekasi untuk di buatkan museum untuk pengenalan kepada generasi muda Kota Bekasi. Untuk perencanaan 5 tahun kedepan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus mampu mewujudkan kawasan kawasan wisata budaya terutama pada bangunan benda cagar budaya, situs dan monumen yang ada di Kota Bekasi. Dapat diambil kesimpulan Isu

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

strategis bidang kebudayaan adalah **"Mempersiapkan wisata budaya yang siap kunjung"**

Permasalahan yang di hadapi bidang pengembangan kesenian didalam melaksanakan tugasnya adalah sulitnya sanggar sanggar seni tradisional untuk dapat berkembang di tengah masyarakat. Kalau di lihat dari perkembangan Kota Bekasi yang cukup pesat dikhawatirkan seni budaya Bekasi akan tergerus oleh perkembangan zaman dan budaya dari luar Bekasi. Kondisi sanggar sanggar seni tradisional Bekasi perlu memdapatkan perhatian dari pemerintah baik dari kondisi fisik tempat sanggar maupun dari segi pemasaran atau pementasan kreatifitas keseniannya.

Selain itu belum adanya sarana tempat penyelenggaraan festival seni budaya juga sangat mempengaruhi kreatifitas para seniman/pelaku seni. Adalah kewajiban pemerintah daerah untuk dapat melestarikan seni budaya daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap pelaku seni. Dari beberapa permasalahan diatas maka Isu strategis bidang pengembangan kesenian adalah **" Meningkatkan kreatifas sanggar seni budaya Bekasi "**

**2. Bidang urusan Pariwisata**

Bidang pariwisata dengan sasaran strategi meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan melalui program pengembangan destinasi kepariwisataan akan menggali potensi wisata alam atau buatan di Kota Bekasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pariwisata, dan sektor pendukung lainnya (hotel, restouran, dan lain-lain), di antaranya meliputi:

1. Diperlukan suatu kebijakan umum daerah yang diarahkan kepada peningkatan potensi-potensi pariwisata potensial di Kota Bekasi;
2. Terbatasnya sarana prasarana budaya dan pariwisata;
3. Alokasi dana pariwisata bagi pengembangan pariwisataan potensial yang belum memadai;
4. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif baik pada dinas terkait maupun sektor pariwisata;

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

5. Belum dilakukan sistem pendataan potensi pariwisata dan pola strategi pengembangan kepariwisataan di Kota Bekasi secara komprehensif.
6. Belum memadai nya media informasi dan komunikasi berkaitan dengan pariwisata di Kota Bekasi.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepariwisataan di Kota Bekasi perlu mendapatkan penanganan serius diantaranya :

1. Perlu adanya penataan destinasi wisata di Kota Bekasi melalui penggalian objek wisata alam atau buatan. Yang menjadi sasaran objek wisata alam di Kota Bekasi saat ini adalah Wisata Air Situ Rawa Gede dan Kalimalang , Wisata Kuliner dan Kawasan Wisata Curug Parigi.
2. Perlunya pengadaan system informasi bidang kepariwisataan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

   Karena penataan objek wisata alam banyak menemui kendala antara lain : Minimnya anggaran yang dialokasikan, masalah kepemilikan tanah, dan sulitnya akses jalan ke lokasi wisata, untuk Isu strategis bidang pariwisata adalah **"Penataan dan pengembangan wisata alam dan menciptakan objek wisata buatan "** seperti wisata air dan kawasan wisata kuliner.
3. Perlu dikembangkan ide-ide kreatif melalui ekonomi kreatif yang terhimpun dalam 17 sub sektor ekonomi kreatif untuk menorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan gedung BCCP sebagai tempat bekerja dan berkolaboratif para pelaku ekonomi kreatif.

Kendala yang dihadapi bidang pemasaran di dalam melaksanakan tugasnya antara lain : belum adanya objek wisata alam, seni budaya Bekasi kurang diminati masyarakat Bekasi, objek lain seperti benda situs, cagar budaya belum siap kunjung, kurangnya sarana media promosi seni budaya dan pariwisata.

Bidang pemasaran mempunyai tugas memperkenalkan seni budaya Bekasi, sejarah perjuangan Bekasi, tempat tempat wisata baik wisata alam maupun buatan seperti : wisata kuliner dan wisata belanja. Selain objek yang akan dipasarkan juga tidak kalah

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

pentingnya alat yang dipergunakan untuk memasarkan atau menjual kepada masyarakat Bekasi atau ke luar Bekasi. Yang menjadi isu strategis bidang pariwisata saat ini adalah **"Meningkatkan sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata ",** antara lain adalah : belum adanya billboard untuk dipasang pada tempat tempat strategis seperti bandara, stasiun, terminal dan mall, disamping itu belum ada website yang khusus mengakses masalah pariwisata dan budaya, dan kurangnya promosi media seperti : spanduk, banner, brosur dan leaflet.

## B. Urusan pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Bekasi secara vertikal berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Program dan kegitan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari misi pada **Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yaitu :**

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional , daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional;

Selain terkait dengan rencana strategis kementerian pariwisata penyusunan dokumen rencana strategis dinas juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dengan prioritas pembangunan daerah : **Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.**

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat bahwa Kota Bekasi masuk dalam 6 wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis, dan agrowisatawan (WP Bodebekpunjur).

Perkembangan dalam perekonomian saat ini menciptakan konsep baru dengan nama ekonomi kreatif yang menjadi alternatif yang tepat

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

dan secara aktif menopang keberlangsungan perekonomian di Indonesia saat ini. Perkembangan di dunia ekonomi dan bisnis pada saat ini telah mengalami pergeseran dari ekonomi sumber daya menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Ekonomi kreatif mempunyai konsep dimana ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan input dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Oleh karena itu Ekonomi kreatif yang dibagi dalam 17 subsektor perlu didorong dan dikembangkan untuk menjadi lokomotif pembangunan sejalan dengan pembangunan provinsi jawa barat yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai lokomotif perekonomian. Ekonomi kreatif itu sendiri bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendorong menciptakan ide-ide kreatif maupun inovasi baru untuk menciptakan sebuah persaingan dalam dunia ekonomi dan bisnis serta secara garis besar dapat menghasilkan pendapatan secara maksimum dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi dan mendorong ekonomi kreatif dengan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana sehingga berkembang ide-ide kreatif yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi karena pariwisata merupakan lokomotif perekonomian Provinsi.

Urusan pariwisata di Kota Bekasi telah mempunyai payung hukum yaitu **Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2028,** kebijakannya meliputi;

1. Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daearh;
2. Pembinaan pelestarian peninggalan sejaran dan promosi objek-objek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan;
3. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian onjek wisata baru.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kota Bekasi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tujuan dalam menjalankan misi ke 3 Kota Bekasi yaitu :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Melestarikan seni budaya Bekasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Dari tujuan tersebut di atas dijabarkan ke dalam sasaran untuk mendukung program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan
3. Menciptakan wisata budaya siap kunjung
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 4.1**
**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

| NO | TUJUAN | | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE..... | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *2019* | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* |
| 1 | Meningkatkan kunjungan wisatawan | | | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD | 15% | 15% | 19% | 21% | 23% |
| | | 1.1 | Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata | Persentase kawasan wisata yang dikembangkan | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | 1.2 | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| | | | | Rata-rata lama menginap : standar lama menginap | 2 malam | 1 malam | 1 malam | 2 malam | 2 malam |
| 2 | Melestarikan seni budaya Bekasi | | | Persentase Kesenian budaya yang menarik wisatawan | 80% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| | | | Menciptakan wisata budaya siap kunjung | Persentase Kesenian budaya yang menarik wisatawan | 75% | 50% | 85% | 90% | 100% |
| 3 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | Nilai hasil evaluasi Akip | 66,28(B) | 70,05(B) | 72,28(BB) | 75,00(BB) | 77,00(BB) |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

# BAB V
# STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yg diperlukan utk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi- Kota Bekasi dan tujuan-sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah ditetapkan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas:

1) kebijakan internal, yaitu kebijakan OPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
2) kebijakan ekternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh OPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal dalam menganalisa lingkungan strategi menggunakan pendekatan analisis dengan Metode Analisis SWOT (Strength/kekuatan-Weaknesses/kelemahan-Opportunites/peluang-Threats/ancaman).

Adapun faktor-faktor lingkungan strategis internal yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan serta faktor lingkungan strategis eksternal yang terdiri dari Peluang dan Ancaman sebagai berikut :

**1. Analisis Lingkungan Internal**

**Strengths/Kekuatan**

- Letak geografis Kota Bekasi yang strategis
- Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi
- Memiliki asset di bidang pariwisata dan kebudayaan yang potensial
- Memiliki pendapatan daerah yang dapat menunjang bidang pariwisata dan kebudayaan
- Peran kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang positif terhadap pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Weaknesses/Kelemahan**

- Data base potensi setiap bidang masih minim
- Tidak memiliki tenaga fungsional untuk bidang pariwisata dan kebudayaan.
- Masih rendahnya SDM dan pegawai yang berkompeten dibidangnya
- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang pariwisata dan kebudayaan yang kurang memadai
- Masih lemahnya koordinasi antar dinas/ instansi dan dunia usaha/industri serta organisasi sosial dan kemasyarakatan
- Masih rendahnya media informasi dan promosi bidang pariwisata dan kebudayaan
- Masih belum adanya kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi seniman dan budayawan
- Belum maksimalnya penghargaan terhadap insan/lembaga yang berperan dibidang pariwisata dan kebudayaan.

**2. Analisis Lingkungan Eksternal**

**Oppurtunities/Peluang**

- Trend pengembangan pariwisata dan kebudayaan berbasis ICT (Information Communication Technology)
- Pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan yang terintegratif baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
- Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi
- Trend pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang berbasis pada kearifan lokal
- Tumbuhnya organisasi pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi

**Threats/Ancaman**

- Regulasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah
- Tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi
- Dinamika pembangunan akibat pengaruh arus globalisasi

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

- Kurangnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap aparatur pemerintah

**Tabel 5.1**
**ANALISIS FAKTOR INTERNAL (AFI)**

| No | ANALISIS LINGKUNGAN Internal | Skala | Share | Bobot | Rating | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Kekuatan** | | | | | |
| | • Letak geografis Kota Bekasi yang strategis | 3 | 21,43 | 0,11 | 3 | 0,32 |
| | • Memiliki asset di bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang potensial | 4 | 28,57 | 0,14 | 3 | 0,43 |
| | • Memiliki pendapatan daerah yang dapat menunjang bidang kebudayaan dan kepariwisataan | 4 | 28,57 | 0,14 | 2 | 0,29 |
| | • Peran kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang positif terhadap pengembangan bidang kebudayaan dan kepariwisataan | 3 | 21,43 | 0,11 | 3 | 0,32 |
| | **Total** | **14** | **100,00** | **0,50** | **11** | **1,36** |
| 2. | **Kelemahan** | | | | | |
| | • Data base potensi setiap bidang masih minim | 4 | 21,05 | 0,11 | 4 | 0,42 |
| | • Masih rendahnya SDM dan pegawai yang berkompeten dibidangnya | 4 | 21,05 | 0,11 | 4 | 0,42 |
| | • Sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang kurang memadai | 4 | 21,05 | 0,11 | 3 | 0,32 |
| | • Masih lemahnya koordinasi antar dinas/ instansi dan dunia usaha/industri serta organisasi sosial dan kemasyarakatan | 3 | 15,79 | 0,079 | 4 | 0,32 |
| | • Masih rendahnya media informasi dan promosi bidang kebudayaan dan kepariwisataan | 4 | 21,05 | 0,105 | 3 | 0,32 |
| | **Total** | **19** | **100,00** | **0,50** | **18** | **1,79** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 5.2**
**ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (AFE)**

| NO | ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL | Skala | Share | Bobot | Rating | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PELUANG** | | | | | |
| | • Trend pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan berbasis ICT (Information Communication Technology) | 3 | 18,75 | 0,09 | 3 | 0,28 |
| | • Pengembangan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang terintegratif baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional | 3 | 18,75 | 0,09 | 4 | 0,38 |
| | • Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi | 3 | 18,75 | 0,09 | 3 | 0,28 |
| | • Trend pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan yang berbasis pada kearifan lokal | 4 | 25,00 | 0,13 | 4 | 0,50 |
| | • Tumbuhnya organisasi pengembangan bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bekasi | 3 | 18,75 | 0,09 | 3 | 0,28 |
| | **Total** | **16** | **100,00** | **0,50** | **17** | **1,72** |
| **2.** | ANCAMAN | | | | | |
| | • Regulasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah | 4 | 36,36 | 0,18 | 4 | 0,73 |
| | • Tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi | 3 | 27,27 | 0,14 | 3 | 0,41 |
| | • Dinamika pembangunan akibat pengaruh arus globalisasi | 4 | 36,36 | 0,18 | 3 | 0,55 |
| | **Total** | **11** | **100,00** | **0,50** | **10** | **1,68** |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara grafik startegi pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan **Strategi ke arah Aggresive**.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Strategi pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Penggalian objek wisata alam maupun buatan
2. Mengembangkan ekonomi kreatif.
3. Analisa pasar untuk promosi objek pariwisata seni dan budaya
4. Peningkatan sarana dan prasarana promosi
5. Peningkatan promosi pariwisata, seni dan budaya di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
6. Pemajuan Kebudayaan (UU No 5 tahun 2017)
7. Peningkatan fasilitas dan bangunan pengelolaan situs cagar budaya
8. Pengembangan kualitas perlindungan dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya
9. Peningkatan penyelenggaraan event dan festival kesenian tradisional dan kontemporer
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik
11. Peningkatan akuntabilitas kinerja

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta visi dan misi Kota Bekasi melalui :

1. Menciptakan objek wisata alam maupun buatan
2. Penataan dan pengembangan industri pariwisata yang didukung ekonomi kreatif
3. Pendataan produk pariwisata seni dan budaya
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata seni dan budaya
5. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata seni dan budaya
6. Promosi pariwisata seni dan budaya di dalam dan luar negeri
7. Penyusunan pokok pokok pikiran kebudayaan
8. Pembangunan museum seni budaya dan sejarah Kota Bekasi
9. Pembangunan kampung budaya
10. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

11. Penyelenggaraan pembinaan terhadap sanggar dan pelaku seni di Kota Bekasi
12. Penyelenggaraan lomba kreatifitas, festival seni tradisional dan kontemporer
13. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan.
14. Peningkatan disiplin pegawai
15. Pengembangan sumber daya aparatur
16. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
17. Peningkatan kualitas kinerja.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 5.3**
**Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan**

| **Visi Kota Bekasi : Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Misi 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik** | | | | |
| **Misi 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing** | | | | |
| | **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1 | Meningkatkan kunjungan wisatawan | 1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata | ▪ Penataan potensi kawasan wisata di Kota Bekasi<br>▪ Peningkatan usaha/jasa pariwisata yang berijin | ▪ Penataan dan pengembangan kawasan wisata kuliner<br>▪ Penciptaan kawasan wisata berbasis kreatif<br>▪ Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku jasa kepariwisataan dan Hiburan Umum |
| . | | 2. Meningkatnya kunjungan wisatawan | ▪ Meningkatkan jumlah penyelenggaraan festival dan keikutsertaan pada tingkat nasional | ▪ Penyelenggaraan event festival seni budaya dan pariwisata<br>▪ Keikutsertaan dalam event provinsi dan nasional<br>▪ Pemilihan duta wisata |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Melestarikan seni budaya Bekasi | 3. Menciptakan wisata budaya siap kunjung | ▪ Pelestarian benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi | ▪ Pemeliharaan benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi<br>▪ Menyusun kajian penetapan benda bersejarah |
| | | | | ▪ Pembangunan tugu perjuangan |
| | | | ▪ Menciptakan museum sejarah perjuangan | ▪ Penataan gedung papak menjadi museum sejarah perjuangan Kota Bekasi<br>▪ Menyusun kajian museum sejarah Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ Mengembangkan event Bekasi kreatif | ▪ Penyelenggaraan festival budaya daerah<br>▪ Penyelenggaraan perkembangan keragaman budaya daerah<br>▪ Pembinaan sanggar seni budaya |
| | | | ▪ Pengadaan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan | ▪ Pembentukan dan pembinaan marching band<br>▪ Penyelenggaraan festival seni siswa nasional<br>▪ Pengadaan alat alat kesenian<br>▪ Pemeliharaan gedung kesenian |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | ▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik<br><br>▪ Peningkatan kualitas Akuntabilitas kinerja<br><br>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat | ▪ Peningkatan disiplin pegawai<br><br>▪ Pengembangan sumber daya aparatur<br><br>▪ Peningkatan efektifitas dan efisinsi pengelolaan keuangan<br><br>▪ Peningkatan kualitas laporan kinerja |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 -2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, adapun Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 "Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan" . Kemudian Visi diterjemahkan kedalam 5 Misi Pembangunan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masuk kedalam Misi 1 dan Misi ke 3 yaitu Misi 1 " Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik " dan Misi 3 " Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing " . Untuk melaksanakan Misi Pembangunan ditetapkan 45 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi.

Program Prioritas Pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pariwisata dan kebudayaan adalah :

1. Pengembangan "urban tourism" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi.
2. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.

Adapun Isu strategis Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut :

1. Penataan dan pengembangan wisata alam dan menciptakan objek wisata buatan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata
3. Menciptakan wisata budaya yang siap kunjung
4. Meningkatkan kreatifitas sanggar seni budaya Bekasi

Sebagai implementasi pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi dan isu strategis Organisasi Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis 2018 -2023 sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan;
2. Melestarikan seni budaya Bekasi;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas

Sasaran :

1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan
3. Menciptakan wisata budaya siap kunjung

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai maka ditetapkan program Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari program prioritas pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program yang ditetapkan diukur keberhasilannya melalui indikator program dengan target pertahun, dan dilaksanakan melalui kegiatan.

**Kegiatan** adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Dengan demikian untuk pencapaian kinerja program harus ada langkah langkah aktifitas yang dituangkan dalam kegiatan kegiatan yang menghasilkan output kegiatan dan pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian program (outcome).Untuk pengukuran tercapai tidaknya suatu program ditetapkan indikator kinerja program disertai dengan target yang harus dicapai dan merupakan alat ukur keberhasilan suatu program.

Indikator kinerja merupakan standar kinerja (performance) yang harus dicapai dan mempunyai kriteria SMART (specific, measurable, achievable, rational dan time) untuk mengukur sukses atau tidaknya suatu organisasi.

Jenis Indikator Kinerja antara lain :

1. Indikator Masukan (*Inputs*): mengukur jumlah sumber daya seperti: anggaran, tenaga kerja (SDM), peralatan, bahan pedoman, juklak/juknis, waktu dan input lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator Keluaran (*Outputs*): lebih menitikberatkan pada hasil fisik yang dicapai seperti jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah peraturan yang ditetapkan, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan.
3. Indikator Proses (*Process*): menekankan pada cara pencapaian tujuan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Contoh : persentase jumlah

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

perempuan terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kab.

4. Indikator Manfaat (*Outcomes*): menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang diperoleh suatu kegiatan. Contoh: berfungsinya pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat.
5. Indikator Dampak (*Impacts*): menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka panjang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Indikator ini dapat diketahui jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 6.1**
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi**

| TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 (URUSAN/BD. URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD | | | |
| | | | | | | | | | | TARGET | Rp (jt) | TARGET | Rp (jt) | TARGET | Rp (jt) | TARGET | Rp (jt) | TARGET | Rp (jt) | TARGET | Rp (jt) | | |
| *1* | *2* | *3* | | | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| **1. Meningkatkan kunjungan wisatawan** | **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD** | | | | | | | | *343.338.295.959* | *416.895.721.908* | | *518.128.702.610* | | *364.353.346.377* | | *371.640.413.304* | | *379.073.221.570* | | *379.073.221.570.* | | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI** | - |
| **Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata** | **Persentase kawasan wisata yang dikembangkan** | | | | | **Program Promosi Pariwisata** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Jumlah kawasan wisata yang ditata** | 2 lokasi | **1** | **3,900** | **1** | **5,200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | Bidang Pariwisata | **Situ Rawa Gede, Hutan Bambu** |
| | | | | | | pengembangan daerah wisata berbasis kreatif | | Jumlah daerah wisata berbasis kreatif di Kota Bekasi | 1 kawasan | 1 | 300 | 1 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Situ Rawa Gede,Hutan Bambu |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | penataan dan pengembangan kawasan kuliner | | Jumlah kawasan wisata kuliner yang dilakukan penataan di kota bekasi | 1 kawasan | 1 | 500 | 1 | 550 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Duta Harapan, Center Point |
| | | | | | | pengembangan potensi usaha kepariwisataan kota bekasi | | Jumlah dokumen kajian sebagai bahan kebijakan | 1 dokumen | 1 | 250 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Kota Bekasi |
| | | | | | | pembangunan kemitraan kepariwisataan | | Jumlah pemberian pesona pariwisata | Sertifikat | 5 | 250 | 6 | 300 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Untuk Tahun berikutnya tidak dimasukan target |
| | | | | | | Penataan dan pengembangan kawasan objek wisata | | Jumlah kawasan wisata alam/buatan yang ditata | 1 kawasan | 1 | 2,000 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Situ Rawa Gede, Duta Harapan, Hutan Bambu |
| | | | | | | | | **Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berijin** | 1200 pelaku usaha | 41,67 | **600** | 10 | **700** | - | - | - | - | - | - | | | | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | | Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dilakukan pembinaan kompetensi dan profesionalisme | 50 pelaku usaha | 50 | 200 | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Kota Bekasi meliputi prlaku usaha, hotel, restoran atau rumah makan dan hiburan |
| | | | | | | pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku jasa kepariwisataan dan hiburan umum | | Jumlah perizinan dan kepatuhan pelaku usaha kepariwisataan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku | 50 pelaku usaha | 50 | 300 | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pariwisata | Kota Bekasi meliputi prlaku usaha, hotel, restoran atau rumah makan dan hiburan |
| **2. meningkatnya** | **Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan** | | | | | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah kunjungan wisatawan** | 907.729 orang | **925 883** | **3,050** | **944 400** | **3,400** | - | - | - | - | - | - | | | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDA** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kunjungan wisatawan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **YAAN KOTA BEKASI** | |
| | **Rata-rata lama menginap** | | | | | | | 1 malam | **2** | | **1** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **Bidang Pemasaran** | **KOTA BEKASI** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | promosi pariwisata nusantara | | Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan kota bekasi | 1 event | 1 | 600 | 1 | 650 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **Bidang Pemasaran** | Tarakan |
| | | | | | | bekasi night Festival | | Jumlah event yang dilaksanakan | 1 event | 1 | 700 | 1 | 750 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **Bidang Pemasaran** | Summarecon Bekasi |
| | | | | | | promosi khas seni budaya bekasi | | Jumlah event yang dilaksanakan | 1 event | 1 | 400 | 1 | 450 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Kota Bekasi |
| | | | | | | pemilihan abang mpok kota bekasi | | Jumlah duta wisata yang terpilih | 18 orang | 18 | 700 | 18 | 750 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **Bidang Kebudayaan** | Bekasi Selatan, Bekasi Timur |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | pengembangan dan penguatan database kepariwisataan | | Jumlah data base yang akurat baik melalui aplikasi dan tersedianya profil kepariwisataan kota bekasi | 1 sistem | 1 | 200 | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pemasran | Kota Bekasi |
| | | | | | | sosialisasi informasi pariwisata kota bekasi | | Jumlah informasi pariwisata kota bekasi yang di sosialisasikan | 1 event | 1 | 200 | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pemasran | Kota Bekasi |
| | | | | | | aktualisasi abang mpok kota bekasi | | Jumlah sosialisasi pariwisata dan budaya yang dilaksanakan oleh abang mpok kota bekasi | 1 event | 1 | 250 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Kota Bekasi |
| **melestarikan seni budaya bekasi** | **Persentase sanggar seni budaya dalam kondisi baik** | | | | | | | | 70 % | 85 % | | 85 % | | - | - | - | - | - | - | | | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI** | |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Jumlah peningkatan kopetensi SDM pariwisatadan ekonomi kreatif** | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | | **Bidang Pariwisata** | Kota Bekasi |
| **menciptakan wisata budaya siap kunjung** | **Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan** | | | | | **Program Cagar Budaya** | **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** | **Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan** | 8 situs | **3** | **0** | **3** | **2,000** | - | - | - | - | - | - | | | **Bidang Kebudayaan** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | pemeliharaan cagar budaya, situs dan monumen kota bekasi | | Jumlah cagar budaya, situs dan monumen di kota bekasi yang dipelihara | Unit/gambar | 3 | 300 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Kota Bekasi |
| | | | | | | penyusunan kajian penetapan cagar budaya, situs dan monumen kota bekasi | | Jumlah dokumen kajian penetapan cagar budaya, situs dan monumen di kota bekasi yang tersedia | 1 unit | 3 | 300 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pembangunan tugu sejarah perjuangan kota bekasi | | Jumlah tugu bersejarah kota bekasi yang dibangun | 1 unit | 1 | 500 | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Bekasi Timur |
| | | | | | | | **Jumlah Museum kebudayaan yang di bangun** | **unit** | **0** | **-** | **0** | **-** | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | **Kota Bekasi** |
| | | | | | Penataan gedung papak sebagai museum sejarah perjuanagn Bekasi | | Jumlah museum sejarah perjuangan Kota Bekasi yang dibangun | % | 10 | 400 | 50 | 500 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Bekasi Timur |
| **meningkatnya jumlahsanggar seni budaya yang aktif** | **persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan** | | | | **Program Pengembangan Kesenian** | **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** | **Jumlah Penyelenggaran event Bekasi Kreatif** | 6 event | **8** | **4,800** | **5** | **5,550** | - | - | - | - | - | - | | | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI** | Kota Bekasi |
| | | | | | festival permainan tradisional | | Jumlah permainan tradisional bekasi yang dilestarikan | 10 permainan | 10 | 300 | 10 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | penyelenggaraan keragaman budaya daerah (dalam rangka peringatan hari-hari besar) | | Jumlah event festival seni budaya yang diselenggarakan | 2 event | 2 | 600 | 2 | 650 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Balai Patriot |
| | | | | | | penyelenggaraan festival budaya daerah tingkat wilayah II, tingkat provinsi jawa barat, dan tingkat nasional | | Jumlah eventfestival seni budaya tingkat wilayah II, propinsi dan nasional yang diikuti | event | 3 | 400 | 4 | 450 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Bekasi Selatan, Bekasi Utara |
| | | | | | | festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) | | Jumlah event festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat kota bekasi, provinsi dan nasional yang diselenggarakan | 2 event | 2 | 400 | 2 | 450 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | anugerah seni kota bekasi | | Jumlah pemberian anugerah seni tingkat kota bekasi | piagam | 3 | 200 | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Kota Bekasi |
| | | | | | | pembinaan sanggar seni tradisional kota bekasi | | Jumlah sanggar seni tradisional kota bekasi yang dibina | 50 orang | 50 | 300 | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Gedung Kesenian |
| | | | | | | Pengadaan alat-alat dan operasional gedung kesenian | | Jumlah paket yang diadaan untuk pemeliharaan gedung kesenian | 1 paket | 1 | 400 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Kota Bekasi |
| | | | | | | penyelenggaraan festival seni budaya sejawa barat | | Jumlah event penyelenggaraan festival seni budaya sejawa barat | 5 kab/kota | 5 | 500 | 7 | 550 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Flyover Ahmad Yani |
| | | | | | | pasanggiri angklung tingkat SD/SMP/SMA kota bekasi | | Jumlah pelatihan angklung tingkat kota bekasi dan pasanggiri angklung se kota bekasi yang diselenggarakan | 1 event | 1 | 250 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | BCP Bekasi Selatan |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | pembentukan dan pembinaan kelompok marching band ASN kota bekasi | | Kelompok marching band ASN kota bekasi yang dibentuk dan dibina | Kelompok | 1 | 300 | 1 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Pengembangan Kesenian | Diinas Pariwisata dan KebudayaaN Kota Bekasi |
| | | | | | | jambore budaya | | Jumlah event jambore budaya tingkat kota bekasi yang diselenggarakan | 1 event | 1 | 300 | 1 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Bekasi Selatan |
| | | | | | | gelar budaya tingkat Kecamatan | | Jumlah gelar budaya tingkat Kecamatan yang dilaksanakan | 2 kec | 2 | 300 | 2 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Jatisampurna |
| | | | | | | anugerah budaya | | Jumlah pemberian anugerah budaya tingkat kota bekasi | orang | 3 | 250 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | | | Bidang Kebudayaan | Bekasi Selatan |
| | | | | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | Jumlah kebutuhan Administrasi Perkantoran setiap tahun | | 100% | | 100% | | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | | Jumlah gaji Jasa Tenaga Administrasi perkantoran | | 32 org 12 bln | 1.487 | 32 org 12 bln | 1.600 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | jumlah Alat Tulis Kantor | | 97 jenis ATK | 100 | 97 jenis ATK | 150 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 pkt | 557 jenis brg,66.074 lmbr, 120 buah | 100 | 557 jenis brg,66.074 lmbr, 120 buah | 150 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jumlah komponen instalasi listrik | | 9 jenis brg | 10 | 9 jenis brg | 20 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Jumlah jasa kebersihan kantor | | 105 bh,461 bh, 12 bln, 36 org | 150 | 105 bh,461 bh, 12 bln, 36 org | 200 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | | jumlah Jasa Komunikasi dan listrik | | 1 rek listrik dan tlp | 350 | 1 rek listrik dan tlp | 400 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan | | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perUndang-undangan | | 5700/3 bk,surat kabar, majalah/tahun | 30 | 5700/3 bk,surat kabar, majalah/tahun | 40 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi | | 396 perjlnan dinas luar daera | 250 | 396 perjlnan dinas luar daera | 300 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | h/dalam provinsi Eselon II,III,IV,Gol IV,III,II dan Non PNS | | h/dalam provinsi Eselon II,III,IV,Gol IV,III,II dan Non PNS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Makan dan Minuman | | jumlah Makanan dan minuman harian pegawai , Rapat dan tamu | | 4587 makan dan minuman | 35 | 4587 makan dan minuman | 40 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintah daerah | | jumlah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah | | 10 adventorial | 50 | 10 adventorial | 55 | - | - | - | - | - | - | | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | | jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 100% | | 100% | | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudaya |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | an Kota Bekasi |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | 47 alat kantor/tahun | 25 | 47 alat kantor/tahun | 30 | 47 alat kantor/tahun | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | 800m2/tahun | 100 | 800m2/tahun | 150 | 800m2/tahun | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional | | jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional, BBM,Perpanjangan KIR dan STNK | | 7 unit, 12 bln | 150 | 7 unit, 12 bln | 200 | 7 unit, 12 bln | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | | 100% | | 100% | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Jumlah Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Formal | | 67 org | 20 | 67 org | 30 | 67 org | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da Keuangan** | | Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | | 100% | | 100% | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 5 dok | 15 | 5 dok | 20 | 5 dok | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan | | jumlah Laporan Keuangan | | 4 dok | 15 | 4 dok | 20 | 4 dok | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |
| | | | | | | Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | | Jumlah Laporan Bulanan ,semesteran dan Laporan Akhir Tahun Pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD) | | 192 bk lap. Bln. Triwulan, semester dan akhir thn | 15 | 192 bk lap. Bln. Triwulan, semester dan akhir thn | 20 | 192 bk lap. Bln. Triwulan, semester dan akhir thn | - | - | - | - | - | - | | Sekretariat | Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 6.2**
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI TAHUN 2021-2023**
**(nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020)**

| TUJUAN | SASASARAN | KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan) | | | | | NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 | INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| | | | | | | | | | | TARGET | PAGU (Rp) | TARGET | PAGU (Rp) | TARGET | PAGU (Rp) | TARGET | PAGU (Rp) | TARGET | PAGU (Rp) | TARGET | PAGU (Rp) | | |
| (1) | (2) | (3) | | | | | (4) | (5) | (6) | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| **Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud** | | | | | | | | **Nilai Hasil AKIP Disparbud** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **20%** | | **50%** | | | | | | | |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disparbud** | | | | | | | **Nilai Hasil AKIP Disparbud** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **72,28 (BB)** | | **75,00 (BB)** | | | | | | | |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota** | **Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | **50.000.000** | **100 %** | **15.000.000** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | **2** | **19** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | **50.000.000** | **100 %** | **15.000.000** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renstra, Renja,LPPD, Laporan Capaian Kinerja Per Triwulan, LKIP, SAKIP) | | - | - | - | - | 6 Dokumen | 50.000.000 | 6 Dokumen | 15.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2** | **19** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | **8.182.475.000** | **100 %** | **8.070.318.000** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN Disparbud | | - | - | - | - | 35 orang | 8.132.475.000 | 35 orang | 8.060.318.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | | - | - | - | - | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | **2** | **19** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Optimalisasi Disiplin Aparatur** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | **50.000.000** | **100 %** | **50.000.000** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa | Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu | | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | | - | - | - | - | 10 orang | 50.000.000 | 10 orang | 50.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | **2** | **19** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | **695.000.000** | **100 %** | **675.000.000** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik | | - | - | - | - | 178 unit | 50.000.000 | 178 unit | 30.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan yang Disediakan | | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | | - | - | - | - | 249 Unit Jumlah Alat dan Bahan Pembersih, 3707 Unit Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer, 1798 Pack | 255.000.000 | 249 Unit Jumlah Alat dan Bahan Pembersih, 3707 Unit Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer, 1798 Pack | 255.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai | | Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai | | | | | | | |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | | - | - | - | - | 730 Unit Jumlah barang cetak, 22668 lembar Jumlah Penggandaan | 150.000.000 | 730 Unit Jumlah barang cetak, 22668 lembar Jumlah Penggandaan | 150.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan | | - | - | - | - | 14352 exampl ar | 100.000.000 | 14352 exampl ar | 100.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Frekuensi rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | - | - | - | - | 396 kali | 140.000.000 | 396 kali | 140.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | **2** | **19** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | - | **100 %** | 150.000.000 | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya | | - | - | - | - | **-** | **-** | 19 Unit | 150.000.000 | | | | | | |
| | | **2** | **19** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | **100 %** | **1.982.184.000** | **100 %** | **2.152.976.782** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik | | - | - | - | - | 12 rekening/bulan | 150.000.000 | 12 rekening/bulan | 300.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | | - | - | - | - | 32 orang/bulan, 8 orang | 1.832.184.000 | 32 orang/bulan, 8 orang | 1.852.976.782 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | **2** | **19** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 %** | **450.000.000** | **100 %** | **585.000.000** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara | | - | - | - | - | 8 unit | 250.000.000 | 8 unit | 250.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya | | - | - | - | - | 40 unit | 50.000.000 | 40 unit | 35.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Luas Gedung dan halaman Kantor yang terpelihara | | - | - | - | - | 2669 m2 | 150.000.000 | 2669 m2 | 300.000.000 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| **Meningkatkan kunjungan wisatawan** | | | | | | | | **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **20%** | | **20%** | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata** | | | | | | | **Persentase kawasan wisata yang dikembangkan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **20%** | | **20%** | | | | | | | |
| | | | | | | | **Program Peningkatan Daya Tarik** | **Jumlah kawasan yang ditata** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | | **1** | | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Destinasi Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Persentase Jasa Kepariwisataan yang berijin** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **5%** | | **5%** | | | | | | | |
| | | | | | | | **Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata** | **Jumlah kawasan wisata yang difasilitasi sarana dan prasarananya** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 Lokasi** | **500** | **2 Lokasi** | **400** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Pengadaan Yang Siap Dikembangkan | | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Pengadaan Fasilitasi Objek wisata | | - | - | - | - | 2 unit | 200 | 1 Lokasi | 400 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | Jumlah Peningkatan Infrastruktur di destinasi | | | | | | 1 Lokasi | 300 | 1 Lokasi | 400 | | | | | | |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kabupaten/ Kota | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana kawasan wisata | | - | - | - | - | 3 unit | 300 | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten /Kota** | **Jumlah Jasa usaha Kepariwisataan** | | - | - | - | - | 100 lembaga Usaha, 150 Pelaku Usaha, 1 Lokasi | - | 150 lembaga Usaha, 200 Pelaku Usaha, 1 Lokasi | 500 | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Jumlah Usaha /Jasa kepariwisataan Yang Bersertifikasi | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah kepatuhan Pelaku/Jasa kepariwisataan Terhadap Perizinan | | - | - | - | - | - | - | 150 pelaku usaha | 500 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan tren kepariwisataan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | 75 orang | | 150 orang | | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat** | **Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | | **-** | **-** | **-** | **-** | 225 orang, 100 pelaku usaha | - | 325 orang, 150 pelaku usaha, 2 kegiatan | 200 | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Meningkat | | - | - | - | - | - | - | 100 orang | 200 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif yang Meningkat | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terbina | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah Event Kreatif dan Kekayaan Intelektual | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | **Meningkatnya Kunjungan Wisatawan** | | | | | | | **Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **2%** | | **2%** | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Rata-rata Lama Menginap** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 Malam** | | **2 Malam** | | | | | | | |
| | | | | | | | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah Kunjungan Wisatawan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **438.456** | | **447.225** | | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri daya tarik destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata kabupaten /Kota** | **Jumlah Event Pemasaran Pariwisata** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 event** | **250** | **4 event** | **250** | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri | Jumlah Bahan Promosi Kepariwisataan | | - | - | - | - | - | - | Pembuatan 1 Film Dokumenter Kepariwisatan dan Penyediaan sarana/ | 250 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | pelengkapan promosi Kota Bekasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar Negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Event Promosi Kepariwisataan yang terlaksana | | - | - | - | - | 1 event, 1 media display, 129 sovenir, 70 batik | 250 | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik | Jumlah Sarana/Media Informasi Kepariwisataan | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dalam Dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Melestarikan Seni Budaya Bekasi** | | | | | | | | **Persentase Kesenian Budaya yang Menarik Wisatawan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **85%** | | **90%** | | | | | | | |
| | **Menciptakan Wisata Budaya Siap Kunjung** | | | | | | | **Persentase Seni Budaya Yang Menarik Wisatawan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **85%** | | **90%** | | | | | | | |
| | | | | | | | **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** | **Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | 4 | | 4 | | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota** | **- Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 situs** | | **1 Event, 1 Kawasan, 1** | | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | **Situs** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **- Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 Kegiatan** | **100** | **1 Kegiatan** | **750** | | | | | | |
| | | | | | | | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya | | - | - | - | - | 1 kegiatan | 100 | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya | Jumlah Kawasan Objek Cagar Budaya di Kecamatan se-Kota Bekasi | | - | - | - | - | - | - | 1 kawasan | 750 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya, situs dan monumen yang telah ditetapkan untuk dipelihara | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota** | **Jumlah event Cagar Budaya** | | **-** | **-** | **-** | **-** | 3 event | 200 | 3 event | 200 | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Event Gelar Budaya di Kecamatan | | - | - | - | - | - | - | 2 event | 200 | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Situs cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan sesuai dengan penetapan SK Wali Kota Bekasi | | - | - | - | - | 2 situs | 200 | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** | **Jumlah Penyelenggaran event Bekasi Kreatif** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **7 event** | | **9 event** | | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |
| | | | | | | | | **Persentase Sanggar Budaya yang Aktif** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **55 sanggar** | | **55 sanggar** | | | | | | | |
| | | | | | | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota** | **Jumlah Kegiatan pembinaan kesenian** | | **-** | **-** | **-** | **-** | 5 event | 150 | 5 event | 400 | | | | | **Disparbud** | **Kota Bekasi** |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah anggota Marching Band Gita Patriot sebanyak 75 orang | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntuan | Jumlah Event yang diselenggarakan dan diikuti | | - | - | - | - | 3 event | 150 | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |
| | | | | | | | | Jumlah Event Festival Seni Budaya Tk. Nasional | | - | - | - | - | - | - | 1 event | 400 | | | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitan Tata Kelola Lembaga Kesenian | Jumlah Sanggar yang terbina sebanyak 60 sanggar | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Disparbud** | Kota Bekasi |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

# BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja organisasi perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bekasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

**TABEL 7.1**
**Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | **Persentase kawasan wisata yang dikembangkan** | 10 % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 2 | **Persentase peningkatan kunjungan wisatawan** | 907. 729 orang | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.002.204 orang |
| 3 | **Rata-rata lam menginap : standar lama menginap** | 1 malam | 2 malam | 1 malam | 1 malam | 2 malam | 2 malam | 2 malam |
| 4 | **Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan** | 70 % | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% |
| 5 | **Nilai Evaluasi Akip** | 63,49 (B) | 66,28(B) | 70,05(BB) | 73,25(BB) | 75,00(BB) | 77,00(BB) | 77,00(BB) |
| 6 | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

# BAB VIII

# PENUTUP

Salah satu bagian dari Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk periode selama 5 (lima) tahun mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang disusun oleh seluruh jajaran organisasi dan sinegritas dengan para pemangku kepentingan/stakeholder.

Potensi dan kondisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi diperkirakan mengalami pertumbuhan 5 (lima) tahun mendatang, oleh sebab itu berbagai upaya pengembangan dilakukan Pemerintah Kota Bekasi.

Penyusunan Renstra Strategis Perubahan 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, sehingga dengan perubahan yang terjadi sehingga bias yang diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran organisasi dan target yang telah ditetapkan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Rencana Strategis Pariwisata dan Kebudayaan Kota menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |

Dan sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan sehingga pelaksanaan pembangunan tercapai sesuai dengan yang kita harapkan.

Bekasi, April 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

**Dr. MOH. RIDWAN, M.M**
Pembina Utama Muda
NIP. 19620103 198503 1 010

| Paraf Koordinasi | |
|---|---|
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kepala Disparbud | |
| Kabag Hukum | |